

KOMUNIKASI POLITIK CALON PETAHANA

**(STUDI KASUS SAIFUL ILLAH DALAM KEMENANGAN PILKADA DI
KABUPATEN SIDOARJO 2015)**

Skripsi

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Filsafat dan Politik Islam



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA		
No. KLAS K U. 2016 023 PI	No. REG	U. 2016 / PI / 023
	ASAL BUKU :	
	TANGGAL :	

Oleh:

QURROTUL UYUN
NIM: E84212090

**PROGRAM STUDI FILSAFAT DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Qurrotul Uyun

Nim : E84212090

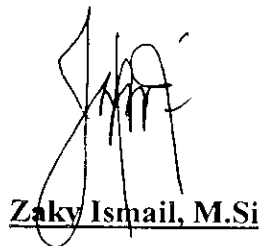
Jurusan : Politik Islam

Judul : **Komunikasi Politik Calon Petahana (Studi Kasus Saiful Illah
Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Agustus 2016

Pembimbing,



Zaky Ismail, M.Si

NIP. 19821230211011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Qurrotul Uyun ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 12 Agustus 2016
Mengesahkan

Prodi Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Dr. Muhid, M. Ag

NIP. 196310021993031002

Ketua

Zaky Ismail, M. Si

NIP. 19821230211011007

Sekretaris

Laili Bariroh, M. Si

NIP. 197711032009122002

Tim Penguji I

Dr. Biyanto, M. Ag

NIP. 197210101996031001

Tim Penguji II

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M. Si

NIP. 196909071994032001

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Qurrotul Uyun

Nim : E84212090

Jurusan : Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Judul : **Komunikasi Politik Calon Petahana (Studi Kasus Saiful Iliah
Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2016



Qurrotul Uyun

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Komunikasi Politik Calon Petahana (studi kasus Saiful Illah dalam kemenangan pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*: bagaimana strategi komunikasi politik calon petahana dalam kemenangan pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015. *Kedua*, apa saja kendala calon petahana dalam memenangkan pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus, menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Yang dianalisa dengan menggunakan teori komunikasi politik dan strategi politik. Keberhasilan dari sebuah kontestasi politik tidak terlepas dari bagaimana komunikasi politik dan strategi politik yang dimainkan oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Dari data yang ditemukan dilapangan, maka peneliti memperoleh hasil: 1). Komunikasi politik yang digunakan oleh calon petahana itu merupakan tergolong yang efektif. Hal ini didasarkan pada kemampuan Saiful Illah sebagai seorang komunikator bisa menbaur terhadap hampir ke semua kalangan. 2). Strategi politik yang digunakan oleh tim pemenang Saiful Illah pada pilkada 2015 lebih menekankan pada visi-misi dan program jangka pendek maupun jangka panjang misalnya pelayanan kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis sampai SMP dan sebagainya, serta kampanye langsung ke masyarakat. Serta memiliki dua jalur yang *pertama*, melalui gerakan struktur yang meliputi partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Banom-banomnya, NU dan Banom-banomnya seperti, Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU dan IPPNU. Cara sosialisasi yang digunakan untuk tetap mensolidkan suara Abah Ipul itu di mulai dari jamiyah kubro. *Kedua*, melalui gerakan non struktur partai-partai pendukung, ORMAS, UKP, LSM, relawan, pengusaha serta birokrasi. Adapun kendala dalam memenangkan calon petahana menjelang pilkada stabil dan bahkan tidak ada konflik, disebut tidak ada konflik karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesulitan, kejanggalan dan hambatan. Mislanya, kebijakan yang telah dibuat oleh KPU yaitu terkait alat peraga kampanye, mulai dari poster, baliho, pamflet, dan semua itu di batasi hanya untuk calon *incumbent*.

Kata kunci: *Calon Petahana, Komunikasi Poitik, Kemenangan*

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Komunikasi Politik	32
1. Pengertian Komunikasi	32
2. Ciri-ciri komunikator politik.....	37
3. Politikus sebagai komunikator politik.....	39
4. Professional sebagai komunikator politik.....	40

5. Tujuan Komunikasi.....	49
6. Efek komunikasi.....	50
7. Sumber komunikasi.....	51
B. Tinjauan strategi komunikasi politik.....	51
1. Definisi Strategi Komuniksai.....	51
2. Definisi Strategi politik.....	56
3. Strategi kemenangan dalam pilkada.....	57
C. Konsep Pilkada di kabupaten Sidoarjo.....	59

BAB III SETTING LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	
1. Lokasi Geografis.....	66
2. Aspek Demografis.....	68
3. Aspek Ekonomi.....	68
4. Aspek Sosial.....	70
5. Aspek Keagamaan	70
6. Aspek Sosial politik	72
B. Gambaran Umum Pilkada di Kabupaten Sidoarjo.....	80
1. Calon Bupati dan Wakil Bupati pilkada di Kabupaten Sidoarjo.....	82
2. Komunikasi politik Calon Petahana dengan Non petahana.....	88

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Komunikasi politik Calon Petahana di kabupaten Sidoarjo.....	91
B. Komunikasi politik dan Strategi Politik Calon Petahana	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Elektabilitas Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin.....	6
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk 2015	68
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	69
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	71
Tabel 3.4 Profil Bupati	83
Tabel 3.5 Profil Wakil Bupati	83
Tabel 3.6 Profil Bupati	85
Tabel 3.7 Profil Wakil Bupati	85
Tabel 3.8 Profil Bupati	86
Tabel 3.9 Profil Wakil Bupati	86
Tabel 3.10 Profil Bupati	88
Tabel 3.11 Profil Wakil Bupati	88
Tabel 4.1 Hasil Survey Elektabilitas Pasangan Calon Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Peta kabupaten Sidoarjo	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam proses politik, komunikasi politik sangat penting. Salah satu yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia mampu menerapkan komunikasi secara baik antar sesamanya. Tujuan dari berkomunikasi pada dasarnya, untuk mengutarakan maksud seseorang kepada orang lain.

Dalam dunia politik di butuhkan juga komunikasi yang efektif dalam berpolitik. Karena kegiatan politik harus dilandasi oleh kegiatan komunikasi untuk menyalurkan ide, gagasan, dan perjuangan dalam bidang-bidang penting dalam negara. Apabila seorang politisi tidak membicarakan tentang ide, gagasan, dan perjuangan bidang-bidang

penting dalam negara, melainkan membicarakan tentang gaya hidupnya seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi dari kalangan selebriti, artinya ia sedang tidak berperan sebagai politisi. Komunikasi efektif merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dan komunikasi tersebut saling *feedback*.

Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian.

Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling

merespon sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Sehingga komunikasi politik bisa disimpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan didalamnya pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Proses komunikasi politik dimaknai sebagai proses penyampaian pesan.

Pemilihan Kepala Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mengatur bentuk pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah dengan salah satu amanat tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada secara langsung merupakan momentum besar dalam proses membangun demokrasi di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹

¹ UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pada 9 Desember 2015 dilaksanakan untuk pemilihan Gubernur dan wakil , walikota, Bupati, dan Bupati Indonesia untuk masa bakti 2015-2020 yang serentak diikuti oleh seluruh Kota/Kabupaten dan seluruh Provinsi se-Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Sidoarjo. merupakan ajang demokrasi pilkada serentak yang telah dilakukan, sekaligus sebagai ajang bagi partai politik untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, pesta demokrasi yang mewarnai Pilkada Serentak jelas dalam ingatan masyarakat Indonesia.

Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada), para kontestan partai politik saling bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai macam strategi komunikasi politik yang jitu. Tentu, komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik menyesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik mau tidak mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh partai politik. Almond dan Powell (1966) menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik.

Calon Petahana (*incumbent*) dari pasangan calon Saifulillah dan Nur Ahmad Syaifuddin disini komunikasi yang dilakukan oleh saifulillah di masyarakat sidoarjo kurang baik yang mana di salah satu media masa pernah diberitakan. Banyaknya suara suara negatif di

masyarakat, mengenai seringnya Bupati Sidoarjo Saifulillah berkata kotor atau Misuhan (mengumpat dalam bahasa Jawa) langsung direspon oleh Cabup incumbent dari PKB Kabupaten Sidoarjo tersebut.

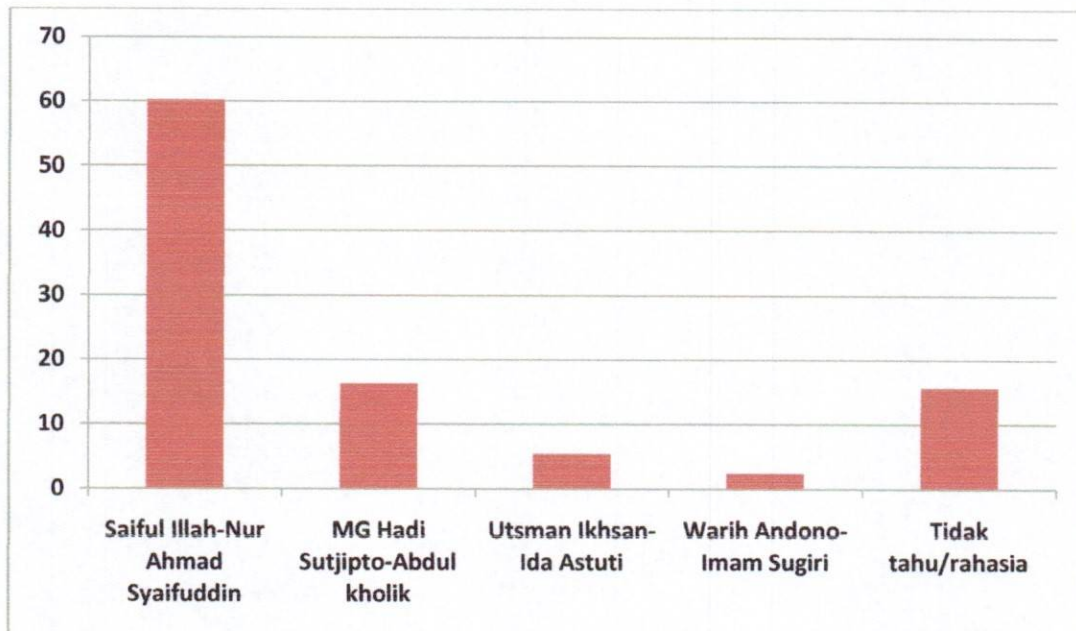
Menanggapi hal itu, Abah Ipul panggilan akrab Saifulillah yang digadang-gadang akan maju berpasangan dengan Cawabup Nur Ahmad Syaifuddin dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada Desember itu, menjelaskan bahwa dirinya berkarakter spontan dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat.

Pasangan petahana ini juga menjelaskan alasan mengapa dia maju kembali di pilbup Sidoarjo, menurutnya DPP PKB tetap menginginkan dirinya untuk maju lagi karena hasil survey dari SMRC, *Saiful Mujami research and consultant* elektabilitasnya masih tinggi

dibanding calon lainnya. Inilah Hasil Survey dari SMRC pilkada Sidoarjo:²

²<http://www.beritametro.co.id/jaum-memilih/hasil-survei-smrc-paslon-nomor-3-tertinggi> di akses 2 Desember 2015. Pukul 20:35.

Gambar 1.1
Elektabilitas Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin



Abah Ipul dalam kesempatan yang sama, berjanji didepan para kyai dan ratusan kader PKB dan jamaah NU, Bahwa dirinya akan mematuhi apapun yang dinasehatkan kepada dirinya demi masyarakat Sidoarjo. Ucapan janji tersebut disampaikan Abah Ipul disela sela memberi sambutan saat acara halal bihalal dan tasyakuran turunnya rekom DPP PKB untuk pasangan yang memiliki jargon “Bersinar” yang mengandung arti bersama Saiful Illah – Nur Ahmad di kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo Jumat (24/07/2015) malam.

Pilkada serentak yang dilaksanakan di kabupaten Sidoarjo meliputi empat calon Bupati beserta partai pengusung diantaranya: MG Hadi Sutjipto berpasangan dengan H. Abdul Kolik (PDIP, Demokrat, Nasdem, PBB dan

PPP), Saiful Illah berpasangan dengan Nur Ahmad Syaifuddin (PKB), Utsman Ikhsan berpasangan dengan Tan Mei Hwa (Gerindra dan PKS), dan kemudian Warih Andono berpasangan dengan Imam Sugiri (PAN dan Golkar).³

Majunya Saiful Illah dalam pilkada 2015 juga diperkuat berdasarkan hasil lembaga survey The Republic Institute (TRiE) , periode 3-9 Agustus 2015. Pasangan Warih-Sugiri dengan jargon WANI 9,4%, Utsman Ihsan-Tan mei hwa dengan jargon USWATAN 4,7%, Sucipto-Kholik dengan jargon HATIKU 24,6% dan Saiful Illah dengan jargon Bersinar 51,3 %.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi komunikasi politik yang digunakan calon petahana (Saiful Illah) yang memenangkan pilkada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini judul penelitian tentang “KOMUNIKASI POLITIK CALON

PETAHANA (Studi Kasus Saiful Illah Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)”.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³ IndoElection, *Banyaknya Calon di Pilkada Sidoarjo Untungkan Petahana*, <http://indoelection.com/banyaknya-calon-di-pilkada-sidoarjo-untungan-petahana/> (akses 28 April 2016)

⁴Kota (sidoarjonews) *Pilkada Sidoarjo The Republic Institute Inilah Popularitas Dan Elektabilitas Masing-Masing Calon*, <http://dprd-sidoarjokab.go.id/survei-pilkada-sidoarjo-the-republic-institute-inilah-popularitas-dan-elektabilitas-masing-masing-calon.html> (akses 28 April 2016).

B. Rumusan Masalah

Setiap pelaksanaan penulisan pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Bertitik tolak dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penulisan ini, maka rumusan masalah tersebut disusun kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi politik Calon Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015?
2. Bagaimana strategi politik calon petahana dalam memenangkan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Strategi Komunikasi politik Calon Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015
2. Untuk mendeskripsikan strategi politik calon petahana dalam memenangkan di Kabupaten Sidoarjo 2015

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Bagi peneliti lain
 - Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pengetahuan masyarakat dalam memilih kepala daerah.

- Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan lebih lanjut.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Islam Negeri Surabaya untuk memperkaya hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini dan untuk memperjelas interpretasi/pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap pokok bahasan Skripsi yang berjudul “Komunikasi Politik Calon Petahana (Studi Kasus Saiful illah Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)”. Maka akan dijelaskan istilah-istilah terkait judul dan konteks pembahasannya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik (*Political Communication*) merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, namun terkait sangat erat, yakni Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan tentang pengertian dan proses komunikasi politik, dibahas lebih dulu tentang pengertian komunikasi dan politik.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap,

pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Berbagai definisi tentang komunikasi antara lain : *"Who says what in which channel to whom and with what effects"* artinya "siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dan dengan pengaruh apa" (Harold Lasswell).⁵

Politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah. Definisi dari politik, antara lain : *"who gets what, when, and how"* artinya siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam itu ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang yang disebut politik adalah kegiatan.⁶

Jadi komunikasi politik secara sederhana adalah komunikasi yang melibatkan pesan - pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media massa untuk mencapai efek yang diinginkan sehingga memperoleh feed back.

⁵ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*, Bandung: Rosdakarya, 1993, 13

⁶ *Ibid*, 8

2. Calon

Orang yg dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, atau orang yg diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.

3. Petahana

Berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan,⁷ dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana. Sebagai contoh, pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah petahana, karena ialah presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi-terbuka (di mana sang petahana tidak mencalonkan diri), istilah "petahana" terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang masih memegang jabatan kekuasaan.

⁷ <https://kamus.kbbi.kemdiklat.go.id/3/0/0/petahana>, Diakses pada tanggal 2 November pukul 19:30

4. Pilkada

Dalam negara demokrasi, pemilihan Kepala Daerah (pilkada) adalah syarat prosedural yang harus dipenuhi. Pilkada menjadi sarana yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara adil, dan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas. Dalam pilkada, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap lebih baik. Dalam pilkada, partai politik dan para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka. Semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati. Tiap warga negara berhak untuk secara bebas memilih calon pilihannya sendiri, dan tiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang meyakinkan pemilih agar memilih dirinya di bilik suara.

Dengan demikian melalui pilkada, tercipta perputaran kekuasaan yang memadai dengan kesempatan yang terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan keahlian. Pilkada memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin politik baru yang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik.

5. Kabupaten Sidoarjo

Adalah sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten sidorajo dihipit dua sungai, sehingga terkenal dengan kota delta. Adapun batas wilayah kota Sidoarjo adalah Sebeiah Utara berbatasan dengan kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Pasuruan, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Sebelah Timur berbatasn dengan Selat Madura.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan penulisan ini diantaranya adalah penelitian dari M. Rosit tentang "*Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenang Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)*". Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini fokus pada strategi komunikasi politik yang membuat pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkan pilkada Banten 2011 diantara lain: Ratu Atut masih merawat tim suksesnya dengan baik, di dukung oleh 11 partai parlemen dan 22 partai non parlemen, disamping mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi, ia juga menggunakan faktor ketokohan dan jaringan politiknya yang kuat dan kokoh dan ke semua strategi

komunikasi politik dan berdasarkan hasil rekomendasi survey.⁸ Sedangkan fokus peneliti disini tentang komunikasi politik calon petahana dalam pilkada 2015 yang menjadi perbedaan, penelitian disini lebih mengacu terhadap Komunikasi politik bupati yang sudah menang dua kali dalam pilkada serentak.

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku atau catatan tertulis yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi. Diantara buku-buku yang menjadi bahan telaah adalah:

Buku yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” yang ditulis Ramlan Surbakti, PT. Gramedia Widiasarma Indonesia. Buku ini membahas tentang sistem perwakilan kepentingan, partai politik, perilaku politik, partisipasi politik, konflik dan proses politik, pemerintah dan pemerintahan, keputusan politik dan kebijakan umum, politik dan ekonomi, dan model-model sistem politik.

Buku yang berjudul “Komunikasi Politik; komunikator, pesan dan media” yang ditulis Dan Nimmo, PT. Remaja Rosdakarya. Buku ini membahas tentang peleburan disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik menjadi subdisiplin komunikasi politik. Buku ini membahas tentang teori,

⁸ M Rosit. *Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenang Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)*. <https://www.google.co.id/lib.ui.ac.id%Ddigital%2F20301204-F30610-Muhamad%2520Rosit>

aplikasi, dan strategi komunikasi politik terutama di Indonesia. Komunikasi dipandang sebagai aspek penting dalam dunia politik.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini sebetulnya luas, namun karena adanya lokasi penelitian mudah dijangkau, subyek penelitian mempunyai karakteristik yang sesuai dengan efektifitas waktu dan tenaga, maka peneliti memfokuskan penelitian dilakukan pada Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang mana hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan partisipasi politik yang didapatkan oleh pasangan kandidat Saiful Illah (BERSINAR) sedangkan hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan pemilih pasangan BERSINAR yaitu di Kecamatan

Jabon dan Wonoayu yang didapatkan oleh pasangan kandidat Saiful Illah (BERSINAR). Sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan penelitian tersebut.

2. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empirik yang menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan, dan mengatasi permasalahan.⁹ Selain itu metode penelitian dalam arti luas merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tertentu.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Calon Petahana (Studi Kasus Saifulillah Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*casestudy*). Dimana secara terminologi pendekatan kualitatif bermakna tentang penelitian yang holistik dan sistematis yang tidak bertumpu pada pengukuran, adapun pengumpulan data adalah peneliti sendiri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena mengamati komunikasi politik saiful illah. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan atas hasilwawancara yang diberikan kepada informan yang memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami objek penelitian secara utuh dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2010, Bandung: Alfabeta, hal. 2-3

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 2010, Bandung: Refika Aditama, hal. 12-13

deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang natural dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

Dalam buku metode penelitian tulisan Saifuddin Azwar, penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir normal dan argumentative. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.¹²

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa penelitian jenis kualitatif ini mendiskripsikan data-data objektif diperoleh pada site penelitian secara menyeluruh dan proposional sehingga diperoleh hasil yang betul-betul obyektif dan apa adanya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 6

¹² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5-6

kualitatif ini menekankan pada cara berpikir lebih mendalam yang bertitik tolak pada fenomena sosial atau paradigma fakta sosial. Jenis penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹³

Sedangkan dilihat dari analisisnya, dalam buku yang sama sebagaimana diatas jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah melakukan analisisnya hanya sampai pada tiap deskripsi, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan data di dasarkan pada analisis presentasi dan analisis pada kecenderungan (*trend*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Mardalis, penelitian kualitatif deskriptif adalah “bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat keitannya antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan

¹³ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), 127

hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti”.¹⁴

Sebagaimana pemaparan diatas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang tidak tertulis hanya pada pemaparan data-data temuan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maka analisa dan interpretasi di tujukan untuk mendiskripsikan tentang strategi komunikasi politik calon petahana dalam memenangkan pilkada 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan konsep-konsep teori yang telah dikembangkan oleh ilmuan sosial.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang bersifat fleksibel, dapat menjelaskan sekaligus menganalisa obyek tertentu yang hendak diteliti. Dengan sifat penelitian bertujuan menjabarkan secara analitik suatu obyek penelitian secara menyeluruh maka penelitian yang memuaskan. Kejelasan hasil analisa yang didapatkan dengan menggunakan jenis penelitian ini digambarkan dari pengertian Masri Singharimbung dalam mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya berusaha menjabarkan suatu fenomena sosial secara terperinci.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 26

Dengan mendeskripsikan data secara rinci dalam suatu fenomena sosial tertentu nantinya diharapkan dapat menjelaskan, menerangkan dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Disamping itu, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data *purposive*.

Di dalam penelitian ini yang dilakukan subjek penelitian adalah:

- a. Anggota partai yang mengusung Saiful Illah dalam kemenangannya dalam pilkada di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Tim sukses dari calon petahana.
- c. Masyarakat yang sudah memiliki hak suara.

4. Sumber data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.

Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sekunder. Mampu memahami dan mengidentifikasi sumber data akan dapat memudahkan

peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil guna memudahkan melakukan pengumpulan data.¹⁵

a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Selain data primer merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tim sukses dari Calon Petahana yang mengetahui betul terkait komunikasi politik Saiful Illah, anggota partai yang mengusung Saiful Illah dalam memenangkan pilkada di kabupaten Sidoarjo, tim sukses dan masyarakat yang memiliki hak suara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Data Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, internet, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.¹⁷

¹⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 91

¹⁶ Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hal, 91

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.XII, 2000, hal. 115

Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jadi data ini berupa bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Sehingga sumber data bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Dan dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari dan membaca literature yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku maupun internet seperti jurnal online dan artikel jurnal atau koran yang memuat berita tentang politik blater

Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, dimana bisa berupa lampiran pertanyaan dan foto.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengunpulkan data dan informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur kepada pihak-pihak yang berkompeten mengenai kasus ini seperti anggota partai pengusung

calon kandidat bupati Sidoarjo. Teknik ini memberikan informasi secara langsung dari nara sumber yang berkompeten dalam pembahasan penelitian ini.

Dalam metode wawancara peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*In Depth Interview*) adalah proses wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan teknik probing oleh seseorang pewawancara yang ahli.¹⁸

Tujuan dilakukan teknik ini adalah untuk mengungkap data yang sangat susah dilakukan dengan interview biasa, karena menyangkut informasi yang sensitif seperti menyangkut informasi yang sensitive menyangkut strategi politik, kepercayaan, maupun keyakinan. Yang akan diteliti menggunakan metode wawancara *in depth interview*

adalah informan dalam penelitian ini, anggota partai pengusung calon kandidat bupati di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara terhadap anggota partai pengusung calon petahana di Kabupaten Sidoarjo, tim sukses, dan masyarakat yang memiliki hak suara.

¹⁸ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 135

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.¹⁹ Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi dengan dokumen kita dapat mengumpulkan data dengan melihat beberapa dokumentasi sebagai informasi tambahan atau otentik sebagai penunjak dalam pengumpulan data sebuah penelitian. Adapun data dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang hasil wawancara serta penelitian yang dilakukan di kabupaten Sidoarjo bersama responden.

6. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan model Snowball Sampling yang diartikan dengan metode untuk mengidentifikasi dan memilih kasus-kasus dalam suatu jaringan yang didasarkan pada analog bola salju yang dimulai dari kecil kemudian menjadi besar ketika menggelinding di atas salju yang basah dan menambah salju lagi. Untuk mempermudah pengambilan data dari responden, peneliti juga menggunakan *Key Informan* yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun setiap orang mampu

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), 191

menjadi informan tapi tidak semua orang menjadi informan yang baik. Pemilihan *Key Informan* didasarkan pada individu-individu yang memiliki keterampilan komunikasi sekaligus memiliki kemauan untuk berbagi data terkait kasus yang diangkat oleh peneliti.

Menurut sebagian ahli *key informan* yang ideal adalah mereka yang memiliki keahlian, pandai bicara, bersedia diwawancarai, berpartisipasi dalam memberikan data dan peka terhadap kultur. Pemilihan *key informan* yang ideal ini bertujuan untuk memberikan kelengkapan data secara luas dan mendalam sekaligus memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini atau dengan kata lain memperluas subjek penelitian.²⁰

7. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah kritis dalam sebuah penelitian, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berdasarkan proses pemilihan informan dan pengumpulan data akan diperoleh. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data tersebut agar dapat ditarik suatu hasil penelitian, hal ini membutuhkan metode.

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan.

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), 92-93

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data yang tidak peneliti terangkan, peneliti kemudian menganalisis data tersebut. Adapun tahapan yang digunakan untuk menganalisa data tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Metode ini dilakukan dengan cara menyusun data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data-data tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan di fokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil observasi dan wawancara.

b. Display Data

Dalam menganailis data peneliti menyajikan data atau display data kedalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis guna menemukan jawaban dan menjelaskan tentang komunikasi politik calon petahana dalam pilkada di Kabupaten Sidoarjo.

c. Verifikasi dan Kesimpulan Data

Dalam proses penyimpulan data ini masih bersifat sementara masih dapat diuji kembali dengan data yang ada dilapangan yaitu

dengan cara merefleksikan kembali data yang sudah didapat, peneliti bertukar pikiran dengan teman sejawat dan triangulasi.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data deskriptif. Model analisis deskriptif ini yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena sosial yang abadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, model, karakteristik, sifat, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.²² Alasan peneliti menggunakan model analisis deskriptif karena, dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terjadi atau dengan kata lain peneliti melakukan *case study* (studi kasus) terkait

Komunikasi Politik Calon Petahana (studi kasus Saiful Illah dalam kemengana pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015).

8. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data-data sudah absah, maka dilakukan teknik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji ulang data-data yang sudah ada dan menelaah kembali hingga data tersebut benar-benar adanya.

²¹ LexyJ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi revisi* (Bandung: Rosdakarya, 2007),

65

²² Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif edisi kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), 68

Maka dalam hal ini untuk mengurangi atau menanggulangi kesalahan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai sehingga sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar belakang penelitian. Agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak mempelajari keadaan dan kebiasaan dapat menguji kebenaran, informasi dan membangun kepercayaan subyek.²³

b. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan suatu ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan-persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain,

²³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 327

jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan itu menyediakan kadalaman.²⁴

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, metode penyelidikan dan teori.²⁵

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Dalam upaya lebih jelas dan mudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian dan mengecek data yang begitu banyak di lapangan. Maka dirasaperlu oleh peneliti untuk melakukan diskusi kepada teman sejawat yang nantinya mengerti terhadap persoalan yang peneliti hadapi.

Ini semua dilakukan untuk meperoleh masukan terhadap apa yang selama ini peneliti lakukan dalam arti jika ada kemencengan data maka segera peneliti mendapatkan semacam petunjuk gambaran tentang langkah-langkah peneliti selanjutnya dalam penelitian.²⁶

²⁴*Ibid*, 329

²⁵*Ibid*, 330-332

²⁶Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 333

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjabarkan tinjauan pustaka serta teori dan pemikiran dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III SETTING LOKASI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai gambaran umum objek yang diteliti

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini penulis membahas seluruh uraian mengenai informasi dan data yang telah dikumpulkan oleh penulis yaitu tentang komunikasi politik calon petahana dalam studi kasus Saiful Illah dalam kemenangan pilkada di Kabupaten Sidoarjo.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Komunikasi Politik

1. Definisi komunikasi politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicos yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera yang berarti hak hak kewarganegaraan.¹

Menurut Gabriel Almond (1960) : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. *"All of the functions*

performed in the political system, political socialisation and recruitment interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication."

Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani,

¹Dan nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989), hal.108

bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan perdebatan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.² Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (*who gets what, when, how*). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh orang-orang yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan.³

Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya. proses tersebut adalah proses komunikasi.

² Ali, novel, *Peradaban komunikasi politik*, (Bandung: remaja rosdakarya 1999), hlm. 120

³ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 23

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan: nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "*Who says what, in which channel, to whom, with what effect*", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk memperjelas pemahaman

berikutnya tentang komunikasi politik, Alwi Dahlan mengemukakan bahwa, sebagai bidang kajian ilmu, komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.⁴ Berbasis pada formulasi komunikasi demikian saja menurut Fagen nampaknya terlalu sederhana, karena alur yang komunikasi politik berjalan satu arah (linier) dari sumber komunikasi sebagai pemrakarsa kepada orang lain sebagai penerimanya. Namun demikian agar memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi. Tanpa ada teori politik umum yang didasarkan pada komunikasi, akan muncul kesulitan bagi “suatu pendekatan untuk studi politik”, suatu pendekatan di mana komunikasi sebagai suatu proses menjadi inti pemahaman, sehingga secara hipotetik nampak berkembang. Fagen menambah usulan bahwa untuk kepentingan penelitian terdapat 3 hal yang penting:

⁴Alwi Dahlan, *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian* dalam Jurnal Ilmu Politik No. 6., Kerjasama AIPI, LIPI, Gramedia, Jakarta: 1990

- a) Komunikasi sebagai proses mengisi politik sebagai suatu kegiatan.
- b) Apabila hal-hal itu tidak jelas benar, maka dapat digambarkan beberapa aspek kehidupan politik sesuai tipe-tipe komunikasi.
- c) Karena proses komunikasi memiliki kemampuan mengisi dan elastis dari perbendaharaan konsep ilmu politik, maka ada suatu literatur yang mungkin relevan bagi studi politik dan komunikasi.

Sebagai tambahan Kaid mengemukakan tak satupun konsep tentang komunikasi politik bisa diterima secara luas, tetapi kecuali apa yang disampaikan Chaffé yang secara sederhana menyampaikan bahwa komunikasi politik adalah “peranan komunikasi dalam proses politik”.

Berkaitan dengan peran komunikasi dalam proses politik itu menjelaskan dengan gamblang menggunakan contoh: setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mereka yang bertugas melaksanakan fungsi legislatif membuat UU yang dianggap perlu dan relevan, yang kemudian dikomunikasikan kepada yang berwenang (eksekutif dengan aparatnya) untuk melaksanakannya. Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada masyarakat dan dinilai oleh masyarakat, penilaian itu kemudian dikomunikasikan lagi. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini media massa, baik cetak maupun elektronika, memainkan peranan penting, di

samping bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, surat-menyurat, media tradisional, keluarga, organisasi, pergaulan.⁵

Berkaitan dengan peran komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan, maka ia berperan memelihara dan mengembangkan budaya politik yang sudah menjadi landasan sistem itu. Oleh karena itu “komunikasi politik berperan mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi penerusnya dan mempekuat proses pembudayannya dalam diri generasi yang lebih tua. Jadi, budaya politik itu terpelihara dengan baik, bahkan mungkin berakar dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi politik yang ada menjadi bagian integral dari budaya politik tersebut”.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Ciri-ciri komunikator politik

Menurut Nimmo,⁷ salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik. Meskipun

⁵ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1990), 2

⁶ *Ibid*, 4

⁷ Dan Nimmo, *komunikasi politik, khalayak dan efek*, (bandung: remaja karya (cv 1989).Hal.25

mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidaknya-tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik dalam proses opini, Leonard W. Dood.⁸ menyarankan jenis jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka. Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi.

⁸ Henri, ida. *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. jakarta, kencana, 2012. Hal. 24

Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu.

3. Politikus sebagai komunikator politik

Kelompok ini adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini.

Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel katz,⁹ menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok: pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak

⁹ Ibid, 24

sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas; mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkupnya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya kita klasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.¹⁰

4. Professional sebagai komunikator politik

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.

¹⁰ Ibid, hal, 25

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey,¹¹ adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama.

Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik. Dalam definisi diatas menunjukkan bahwasanya komunikasi politik lebih di titik tekankan pada proses politik yang berlangsung sesuai dengan sistem yang sudah ada. Idealis sebuah negara disini mulai di prioritaskan karena negara adalah sebuah media yang bisa mengemplementasikan segala hal yang di lakukan oleh warga.

Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu-individu yang berada dalam lingkup sistem politik yang mencerminkan suatu bangunan kehidupan negara dengan segala kompleksitasnya untuk mencapai ideal Negara, sehingga akan tampak jelas perpaduan seluruh unsur yang ada dalam lingkup negara adalah produk komunikasi politik.

¹¹ Ibid, hal, 24

Karena itu komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampilkan karakter sebagai identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni (*pure science*) yang bersifat ideal dan berada dalam lingkup-*das sollen* (apa yang seharusnya) maupun sebagai ilmu terapan yang berada dalam dunia empiris (dunia nyata) dalam lingkup wilayah "*das sein*".

a. Hakikat Komunikasi Politik

Secara filosofis hakikat komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Hakikat kehidupan sebagai motif atau sebagai keinginan yang mendorong manusia untuk berkiprah yang mengarah kepada terpenuhinya tersebut.

Komunikasi politik menjadi disiplin ilmu pada awal tahun 1950-an, istilah komunikasi politik pertama kali di kemukakan secara tegas oleh Euleau, eldersveld, dan janowitz pada tahun 1956. Sejalan dengan munculnya perubahan baru itu terbit pula kajian-kajian politik yang mendudukan komunikasi sebagai faktor penting dalam politik. Komunikasi politik mempunyai salah satu fungsi yang sangat penting dalam sistem politik.¹²

¹² Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, (bandung: remaja rosdakarya 1999), hlm. 2

b. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari banyak bentuk komunikasi baik dari sisi jumlah pelakunya yang relative sederhana seperti halnya komunikasi antar personal (*interpersonal communication*) maupun dalam bentuk yang lebih kompleks seperti halnya komunikasi yang dilakukan oleh sesuatu lembaga (*institutional communication*) maka dalam prosesnya ia tidak terlepas dari dimensi-dimensi komunikasi pada umumnya.

Seperti dalam bentuk komunikasi lainnya, komunikasi berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berasal dari sumber, selaku pihak yang memprakarsai komunikasi, kepada khalayak dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang memungkinkan terjadinya suatu keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya akan ditentukan oleh dimensi-dimensi tersebut secara keseluruhan.

Ada beberapa komponen penting yang terlibat dalam proses komunikasi politik seperti tergambar diatas. *Pertama*, komunikator dalam komunikasi politik, yaitu pihak yang memprakarsai dan mengarahkan suatu tindakan komunikasi. Seperti dalam peristiwa komunikasi pada umumnya, komunikator dalam komunikasi

politik dapat dibedakan dalam wujud individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan orang. Jika seorang tokoh, pejabat ataupun rakyat biasa, misalnya, bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual (*individual source*).¹³

Komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik. Karena itu, menurut Nimmo, sikapnya terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Kedua, khalayak komunikator politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep

¹³ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 31

¹⁴ Ibid, 32

umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan *feedback* dalam sesuatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.¹⁵

Ketiga, saluran-saluran Komunikasi politik, yakni setiap pihak atau unsure yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat fungsi ganda yang diperankan unsure-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, seperti telah dijelaskan diatas, ia berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah; dan di sisi lain, ia juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat. Fungsi ganda yang sama juga biasa diperankan oleh organisasi termasuk ormas-ormas Islam di Indonesia seperti halnya Nahdlatul Ulama (NU) dan

¹⁵ Ibid. 33

Muhammadiyah, partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa.

Untuk menganalisis gejala munculnya ormas-ormas ataupun partai-partai politik di Indonesia, penting pula dicatat bahwa struktur sosial tradisional juga merupakan saluran komunikasi yang memiliki kemampuan tersendiri, karena pada masyarakat tersebut arus komunikasi ditentukan oleh posisi sosial pihak-pihak yang berkomunikasi. Selain saluran komunikasi antar pribadi seperti banyak terjadi di masyarakat, unsure yang tidak kalah pentingnya dalam proses penyampaian pesan-pesan politik adalah media massa. Secara historis, penelitian efek media massa dalam perilaku politik telah cukup memperlihatkan besarnya peran media massa dalam kegiatan komunikasi politik khususnya di Amerika. Di Indonesia, disamping belum banyak penelitian tentang hal tersebut, penggunaan media massa dalam kegiatan kampanye politik tampaknya masih relative rendah.¹⁶

1) Komunikasi politik

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator, yaitu individu-individu yang berada dalam suatu instansi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat

¹⁶ Ibid, 34-35

pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama Negara. Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi, yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijaksanaan nasional. Karena itu sebagai komunikator politik diuntut berbagai persyaratan agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu:

- a. Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan.
- b. Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung.
- c. Berorientasi kepada kepentingan Negara.
- d. Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelligence*).
- e. Jauh dari sikap hipokrit (*cognitive dissonance*).

Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak

duduk pada struktur kekuasaan-kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan.¹⁷

2) Komunikan

Komunikan adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek yang dituju oleh komunikator (pengirim/penyampai pesan), yang menerima pesan-pesan (berita, informasi, pengertian) berupa lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.

3) Isi (pesan-pesan) komunikasi

Isi (pesan-pesan) komunikasi merupakan produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasikan kedalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi akan terdiri dari:

- a. Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi.
- b. Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung pesan.

¹⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*. Bandung, PT Rosda Karya, 2010. Hal. 5

c. Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integrative bagi penghuni sistem.

d. Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Dari ungkapan diatas memberi informasi bahwa komunikasi didalam prosesnya berada pada struktur formal. Pesan-pesan komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran.¹⁸

4) Media komunikasi

Dalam sistem politik yang bagaimana pun bentuk dan sifatnya, maka media komunikasi mendapat tempat yang cukup penting. Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat didalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah direpresentasikan kedalam simbol-simbol kekuasaan.

5) Tujuan komunikasi

Tujuan dari komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan

¹⁸ Ibid, hal. 5

tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekedar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan publik opinion (pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Komunikasi politik juga bertujuan untuk menarik simpatik khalayak dalam rangka meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Selama pilkada berlangsung di Indonesia, banyak muncul konflik horizontal yang berkaitan dengan komunikasi politik. Para kandidat kepala daerah atau calon bupati/ walikota dan juru kampanye selaku komunikator politik melemparkan berbagai isu politik dan membeberkan berbagai kelemahan saingan kandidat bupati/ walikota lainnya.¹⁹ Salah tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik bagi khalayak.

6) Efek komunikasi

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan. Pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan. Efek dapat berlanjut dengan pemberian respon tanggapan atau jawaban

¹⁹ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 44

yang di sebut umpan balik atu feedback. Feedback adalah arus balik yang berupa tanggapan atau jawaban dalam rangka proses komunikasi yang bertujuan untuk saling pengertian atau memperoleh kesepakatan bersama.

7) Sumber komunikasi

Sumber (source) sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, di peroleh atau munculnya isu, informasi yang dapat di jadikan materi pesan komunikasi. Sumber dapat berasal dari individu karena idenya yang sangat berharga, atau dapat pula bersumber dari elit politik dan dapat pula berasal dari suatu faham.

Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat sesuatu sesuai kebijaksanaannya yang telah di tetapkan komunikasi elit berkuasa.

B. Tinjauan Strategi Komunikasi Politik

1. Definisi strategi komunikasi politik

Pada hakekatnya strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, keberadaan

pemimpin politik sangat dibutuhkan di setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya, yang akan merupakan keputusan paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik kedepan.

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan professional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

a) Keberadaan pemimpin politik

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Dalam masyarakat terdapat *stratifikasi* kekuasaan yang dimiliki. Yang memiliki kekuasaan disebut (elit pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan karena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat.

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber

pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang teridir atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu kepemimpinan merupakan upaya untuk melaksanakan tujuan yang menjadi kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikut.²⁰

Pemimpin politik juga berbeda dengan kepala instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahan tidak seperti kepala instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya dapat dinyatakan, pemimpin adalah pihak pembuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan pemimpin. Realitas tertentu lebih kompleks daripada jawaban yang diberikan dengan kedua pandangan tersebut melihat sejarah sebagai produk perbuatan pemimpin yang luar biasa mungkin lebih muda daripada melihat sejarah sebagi produk berbagai faktor sosial, ekonomi, politik.

²⁰ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 73

Namun tepat kalau dikatakan sejarah merupakan hasil interaksi antara faktor tersebut dan hal ini lebih sukar untuk memahaminya.²¹

b) Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan

Langkah kedua dalam strategi komunikasi politik adalah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan politikus dan kemandirian lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.²²

Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan, menurut Rahmat menyebutkannya *ethos*.

Dengan kata lain ketokohan adalah *ethos*, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Dimensi *ethos* yang paling relevan disini ialah kredibilitas, yaitu keahlian komunikator (pemimpin) atau kepercayaan kita kepada beliau. Apabila pemimpin memiliki tiga hal yang ini (kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan), maka ketokohnya dapat disebut juga sebagai tokoh utama pemimpin politik.

²¹ Ibid, 74

²² Ibid, hal. 89

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian, dan sebagainya. Hal ini merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik.

Dengan demikian pahlawan politi memiliki daya tarik tersendiri. yang dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak, terutama calon pemilih. Tokoh politik yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya adalah pemimpin formal atau informal, yang mendapat kepercayaan dari publik atau khalayak.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Menciptakan kebersamaan

Langkah strategi yang ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayal (rakyat) dan menyusun pesan yang *homofilis*. Hal itu dibutuhkan agar komunikator politik dapat melakukan empati. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homofili daripada heterofili. Suasana *homofilis* yang harus

²³ Ibid, Hal. 80

diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik, metode, dan media politik. Namun, yang sangat penting adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya.

Homiofilis merupakan salah satu syarat membangun dan merawat ketikohan bagi politikus, aktivis, dan professional sebagai komunikator politik. Untuk menciptakan homofili dan melakukan empati melalui persamaan kepentingan tersebut, komunikator politik harus terlebih dahulu mengenal, mengerti, dan memahami daya tangkal dan daya serap khalayak, baik bersifat psikologis maupun bersifat sosio-budaya. Hal ini memerlukan berbagai aktivitas seperti penjajakan dan survey penelitian.²⁴

2. Strategi politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *"the art of the general"* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara

²⁴ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 84-85

untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.²⁵ Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

3. Strategi Kemenangan dalam pilkada

Tidak ada rumus pasti untuk menggaransi seseorang untuk memenangkan kompetisi di pemilu. Dimensi politik berbeda halnya dalam dimensi kalkulasi ilmu matematika yang penuh dengan kepastian. Berbeda halnya dengan ilmu politik yang syarat dengan ketidak pastian karena memang objek studi ilmu politik (ilmu sosial) adalah manusia yang selalu bergerak dinamis termasuk meliputi persepsi seseorang terhadap seseorang yang setiap saat dapat berubah-ubah.

²⁵Djahiri A Kosasih, *Politik Kenegaraan Dan Hukum*, (Bandung: Lab PP'kn UPI Bandung, 2003), hal. 31

Keinginan seseorang untuk tampil sebagai calon kepala daerah atau kepala Negara pada pemilu kerap sekali mengalami pasang surut semangat. Karena disaat seseorang memiliki inisiatif keinginan untuk tampil sebagai calon disaat bersamaan juga seseorang tersebut akan berpikir dan terbayang tentang dua hal: pertama luas wilayah daerah pemilihan. Yang kedua, jumlah penduduk yang sangat banyak.

Dengan dua hal diatas, seseorang dengan pola pikir rasional akan mulai berpikir mengenai bagaimana cara menjangkau luasnya wilayah daerah pemilihan serta cara meyakinkan orang lain dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan demikian, seseorang calon yang berpikir rasional dan bijak akan menemukan jawaban efektifitas dan efisiensi sebagai solusi untuk menjawab persoalan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Efisiensi dan efektifitas dapat terapkan dengan kondisi dimana segala sesuatu serba mahal hampir bisa dikatakan tidak ada yang gratis saat ini serta semakin besarnya kecenderungan pola perilaku pemilih yang tradisional atau pragmatis. Oleh karena itu, sebagian kontestan dari kalangan pengusaha bukanlah masalah besar, dan letak masalah sesungguhnya terletak pada seberapa besar modal yang mampu disiapkan untuk menghadapi kompetisi pemilihan.

Jadi tidak heran, ketika kita melihat dalam kompetisi pemilihan banyak aliran uang yang digelontorkan kepada pemilih sebagai stimulus,

subsidi ataupun kompensasi dari keputusan politik pemilih yang telah terbeli. Sehingga bagi kontestan yang memiliki modal besar kekalahan yang diterima olehnya di pemilihan adalah hanya sekedar persoalan modal finansial, yakni finansial rivalitas lebih besar ketimbang finansial yang dimilikinya.²⁶

C. Konsep Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung baik untuk memilih gubernur atau bupati/walikota di Indonesia baru terlaksana sejak Juni 2005. Dari perspektif yuridis, pemilu/pilkada langsung di tanah air merupakan amanat langsung dari UUD 1945.²⁷

Begitu payung hukum penyelenggaraan pilkada langsung itu disahkan (UU No. 32/2004) antusiasme masyarakat seakan mendapat tempat. Paling tidak, antusiasme itu berujung pada optimisme publik akan muncul dan lahirnya kepemimpinan di daerah yang berkualitas. Sekalipun dalam beberapa persoalan mengundang kekhawatiran masyarakat, mekanisme pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini diyakini lebih baik dibandingkan dengan mekanisme pemilihan tidak langsung yang selama ini dilakukan.²⁸

²⁶ Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 46-47

²⁷ Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis."

²⁸ M. Mufti Mubarak, *Sukses Pilkada*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama; 2005), 41

Kendati demikian, bila ditinjau dari perpektif historis yuridisnya, model pelaksanaan demokrasi di daerah sudah mengalami pasang surut. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan entry point perubahan mendasar dalam persoalan kewenangan yang diberikan kepada daerah, apalagi bila dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1974.²⁹

Perubahan itupun, secara niscaya tidak sebatas pada pemberian kewenangan kepada daerah otonom, akan tetapi seiring dengan semangat reformasi, telah membawa gelombang politik yang bermakna dalam demokratisasi lokal, yaitu pemilihan kepala daerah langsung. Perubahan paradigma politik, pertama dan terutama dalam pemilihan kepala daerah, yang senantiasa dijalankan di ruang legislative (DPRD), dewasa ini (baca:

UU No. 32/2004 diundangkan), justru “diserahkan” kepada rakyat di daerahnya masing-masing sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatannya.

Penyaluran hak politik rakyat, secara niscaya berbeda dengan sebelumnya, yang kerap kali diwakilkan kepada wakil-wakilnya di DPRD. Dalam bahasa lain, baik UU No. 5 Tahun 1974, maupun UU No. 22 Tahun 1999 belum memberikan kebebasan untuk rakyat dalam menentukan

²⁹Silahudin, “Memilih Pemimpin Daerah Secara Langsung”, <http://politik.kompasiana.com/2010/06/02/memilih-pemimpin-daerah-secara-langsung/>, diakses 5 Mei 2016

pimpinan daerahnya.³⁰ Keduanya masih tetap menggunakan konsep perwakilan dalam pemilihan kepala daerahnya. Proses perubahan sistem pemilihan dari sistem perwakilan lewat jalur DPRD menjadi sistem pemilihan umum secara langsung yang diserahkan kepada rakyat bukan tanpa dan landasan yang kuat. Penguatan kedaulatan rakyat dan partisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan demokrasi serta ketidakpercayaan rakyat dengan sistem perwakilan yang kerap seiring dengan kehendak rakyat menjadi alasan paling utama untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah.

Menurut Mahfud MD, berdasarkan pengalaman di Indonesia setidaknya ada dua alasan mengapa pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Alasan kedua adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen.³¹

Sementara Maswadi Rauf dalam makalahnya tahun 2005 menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa pemilu langsung perlu digelar, pertama untuk membangun otonomi daerah, kedua, menumbuhkan kepemimpinan lokal, ketiga, meningkatkan akuntabilitas

³⁰ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009), 78

³¹ Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm.133-135

publik dan transparansi pemerintah dan keempat adalah proses legitimasi rakyat yang kuat.

Pemilukada langsung, secara niscaya merupakan perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan figur pemimpinnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sehingga lahir pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat serta memiliki legitimasi politik yang kuat. Itu sebabnya, diperlukan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu membawa daerahnya ke arah perkembangan yang inovatif, berwawasan ke depan, dan siap melaksanakan perubahan yang lebih baik bagi kepentingan daerah yang dipimpinnya. Di dalam itu pun, harapan pemilukada langsung, memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Namun demikian, pemilukada langsung rata-rata baru satu hingga dua periode diberlakukan (sejak tahun 2005). Ini disadari atau tidak, merupakan “sesuatu” yang baru dalam kehidupan politik negara bangsa ini, sehingga dalam realitas fakta sosialnya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif politik, pemilukada langsung sebagai perhelatan demokrasi lokal niscaya merupakan salah satu rangkaian dari proses penataan kehidupan politik negara bangsa Indonesia. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (5) dijelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah itu.

Dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, jelas bahwa pemilihan kepala daerah langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tahun 2005 bagi provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kali pertama menyelenggarakan pemilukada langsung sebagai tonggak sejarah baru dengan memilih langsung gambar pasangan calon oleh rakyat memilih warga provinsi dan kabupaten/kota daerah masing-masing yang telah memiliki hak pilih.

Seiring dengan landasan hukum yang begitu kuat dan adanya harapan pemenuhan hak politik masyarakat secara maksimal, maka eksistensi pemilukada sejatinya harus tetap dipertahankan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. Berbagai kegagalan yang pernah ditorehkan oleh DPRD yang telah diberikan mandat oleh rakyat dalam memilih kepala daerah setidaknya juga akan terjawab dengan diselenggarakannya pemilukada. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan semestinya tidak lagi dibatasi hak politiknya dengan hanya melakukan

pemilihan terhadap anggota legislatif semata, namun juga pemilihan kepala daerah (eksekutif) harus dipertahankan lewat pintu pemilihan oleh rakyat.

Memang, dalam kenyataannya pemi-lukada langsung masih menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bahkan tidak sedikit kalangan yang kemudian berargumen bahwa pemilukada justru hanya membebani keuangan daerah dan menambah maraknya politik uang. Pemilukada langsung masih didominasi kelompok elit tertentu melalui oligarki politik, sehingga menjadi perwujudan demokrasi semu. Proses politik sebagai suatu penguatan masyarakat lokal masih belum terjadi, bahkan lebih jauh dari itu konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme justru sering terjadi.

Guna merespon berbagai pandangan yang berkembang itu, pemerintah telah menggulirkan usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Usulan itu tentunya patut disesalkan. Karenabagaimanapun, pengembalian sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD hanyalah langkah mundur demokrasi di tanah air. Sekalipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur dipilih secara demokratis, pilihan politik pembentuk undang-undang telah mempersempit maknanya menjadi pemilihan secara langsung. Sebagai sebuah *legal policy*, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks lebih luas, *legal policy* pembentuk

undang-undang memaknai frasa “dipilih secara demokratis” menjadi pemilihan langsung merupakan salah satu bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, dengan menggunakan sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya secara langsung menentukan Gubernur. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan terlalu sering mendistorsi kehendak dan logika rakyat.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³² Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009), 79-81

Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi ke dalam tiga wilayah. *Pertama*, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. *Kedua*, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan *pertambakan* dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.¹ Adapun batas-batas wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a) Sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b) Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan
- c) Sebelah timur adalah Selat Madura
- d) Sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Iklim di Kabupaten Sidoarjo tidak berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Curah hujan di Sidoarjo yang paling tinggi terjadi di bulan Januari dan hari-hari yang sering terjadi hujan, terjadi di bulan Desember. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di kecamatan Jabon (81,00 KM²) dan Sedati (79, 43 KM²). Akan tetapi dua kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hampir rata-rata sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61KM².

¹ Sidoarjo Dalam Angka 2015

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pendataan tahun 2016, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Menurut Jenis Kelamin
Hasil Sensus Penduduk 2015

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total
Sidoarjo	95.885	98.166	194.051
Buduran	46.901	45.433	92.334
Candi	72.283	72.863	145.146
Porong	33.771	32.138	65.909
Krembung	29.183	29.175	58.358
Tulangan	43.982	43.440	87.422
Tanggulangin	42.279	42.301	84.580
Jabon	24.966	25.023	49.989
Krian	59.899	58.786	118.685
Balong bendo	33.633	33.232	66.865
Wongdayu	36.017	35.992	72.009
Tarik	30.615	30.362	60.977
Prambon	34.273	34.063	68.336
Taman	107.256	105.601	212.857
Waru	116.242	115.056	231.298
Gedangan	67.757	65.090	132.847
Sedati	46.805	45.663	92.468
Sukodono	55.936	55.185	111.121
Jumlah total	977.683	967.569	1.945.252

Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2015

3. Aspek Ekonomi

Penduduk Kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari aspek ekonomi, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada sektor Swasta. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	PNS	36.915
2	TNI	20.829
3	Polri	15.870
4	Swasta	310.338
5	Pedagang	45.888
6	Petani	29.826
7	Pertukangan	12.848
8	Buruh tani	23.860
9	Pensiunan	22.387
10	Nelayan	17.598
11	Pemulung	6.881
12	Jasa	41.301
Jumlah total		584.541

Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2015

Dari tabel di atas dapat kita ketahui. Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 310.338 jiwa.

Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam sektor jasa

4. Aspek sosial

Realitas kehidupan sosial adalah bagian dari perilaku dan pola dari masyarakat. Di dalam kehidupan sosial yang menyangkut khalayak umum tentu tidak sedikit permasalahan yang lahir, sebagai konsekuensi dari banyaknya penduduk. Permasalahan sosial yang mudah dijumpai dan hampir di setiap tempat ada yakni masalah pengemis dan gelandangan. seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data dinas sosial kabupaten Sidoarjo, pengemis dan gelandangan yang ada di Sidoarjo berjumlah 162 orang, yang terdiri dari 100 orang laki-laki dan 62 orang lainnya perempuan. hal ini merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan agar mereka memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.

5. Aspek Keagamaan

Penduduk Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara. Keberagaman masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tersebar di 18 kecamatan yang masing-masing agama itu memiliki penganut tersendiri. Beberapa agama yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan jumlah pemeluknya terdiri dari; *Pertama*, agama Islam dengan jumlah pemeluk 1.786.226 jiwa. *Kedua*, agama Kristen dengan jumlah pemeluk 36.092 jiwa. *Ketiga*, agama katolik dengan jumlah pemeluk 19.750 jiwa. *Keempat*, agama Hindu dengan jumlah pemeluk 3.958 jiwa. *Kelima*, agama Budaha dengan jumlah pemeluk 3.775 jiwa. *Keenam*, agama konghucu dengan jumlah pemeluk 232 jiwa.

Uraian singkat diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa jumlah agama berdasarkan penganutnya yang paling banyak terdapat pada agama islam. sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Table 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kecamatan	Islam	Katolik	Hindu	Kristen	Budha	Konghuchu	Jumlah total
Sidoarjo	153.979	4.282	542	8926	995	36	168.760
Buduran	178.944	828	135	1705	178	7	181.797
Candi	114.804	742	507	4267	214	-	120.534
Porong	80.187	73	153	625	73	1	81.112
Krembung	63.537	77	18	223	7	-	63.862
Tulangan	79.169	60	5	209	-	2	79.445
Tanggulangin	73.074	98	14	380	5	-	73.571
Jabo	55.090	10	1	32	-	-	55.133
Krian	86.429	613	33	506	148	139	87.868
Balong bendo	60.722	147	22	543	15	-	61.499
Wonoayu	76.821	26	5	209	8	-	77.096
Tarik	61.610	357	2	350	-	-	62.319
Prambon	77.295	159	42	978	-	-	78.474
Taman	173.254	3.855	841	5878	500	47	184.375
Waru	178.019	4.799	1124	6648	962	-	191.552
Gedangan	101.538	1.873	279	2661	541	-	106.892
Sedati	80.607	963	118	1740	54	-	83.482
Sukodono	91.097	788	117	212	75	-	92.289
Jumlah total	1.786.226	19.750	3.775	36.092	3.775	232	1.850.033

Sumber: DDA Kabupaten Sidoarjo, 2012, 176

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidcarjo memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sebab dari jumlah penduduk yang berjumlah 1.850.033 jiwa, 1.786.266 beragama islam. Disamping agama Islam menjadi agama

mayoritas masyarakat, Kabupaten Sidoarjo juga didukung dengan banyaknya pondok pesantren yang berada di wilayah ini.²

6. Aspek sosial politik

Konstelasi politik di Kabupaten Sidoarjo bisa kita identifikasi melalui partai-partai politik yang ikut dalam pilkada. Sebab di tiap-tiap daerah suatu partai politik tertentu mempunyai basis pemilih mayoritas.

Termasuk salah satu bentuk komunikasi politik adalah kampanye, kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan. Dalam Kampanye, terdapat kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kampanye merupakan tahapan yang juga sangat krusial karena masa ini adalah masa dimana pusat perhatian publik tertuju, baik dari peserta Pemilu, pemantau Pemilu, Tim Kampanye serta penyelenggara Pemilu terutama Panwaslih dan masyarakat atau pemilih.

Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 digelar dalam jangka waktu yang cukup panjang, yakni mulai dari tanggal 27 Agustus 2015 atau 3 hari setelah penetapan pasangan calon (24 Agustus 2015), sampai dengan 5 Desember 2015. Jika

² kabupaten Sidoarjo memiliki 64 pondok pesantren. lihat:
http://wiki.aswajanu.com/Pesantren_di_Kota_Sidoarjo (diakses pada 22 Juni 2013, pukul 04.00)

dihitung sesuai hari kalender, maka peserta Pemilu punya waktu 101 hari untuk berjuang meraih simpati rakyat yang memiliki hak pilih. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang. Jika dibandingkan dengan masa kampanye pada Pilkada-pilkada sebelumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, masa kampanye hanya diberikan rentang waktu 14 hari atau 2 minggu. Waktu yang panjang untuk berkampanye dalam kurun waktu sekitar 3 bulan lebih ini dimaksudkan untuk mengakomodir ekspektasi pasangan calon yang ingin langsung berkampanye segera setelah penetapan calon, dan juga untuk memberi ruang yang luas bagi kandidat dalam menyampaikan visi-misi dan program untuk menarik masyarakat supaya menjatuhkan pilihan kepada calon tersebut. Di sisi lain, rentang waktu yang panjang ini juga diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat/pemilih untuk mengenal lebih dalam para calon sehingga tidak salah menentukan pilihan.

Dalam kurun waktu kampanye ini pula, usaha-usaha meraih simpati dilakukan para kandidat dengan beradu strategi memanfaatkan berbagai metode kampanye. Namun demikian, meskipun jangka waktu yang tersedia (3 bulan) untuk beradu strategi terbilang panjang, tetapi metode kampanye yang dilakukan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 bukanlah tiada batas. Pembatasan-pembatasan dalam kampanye ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana

diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-undang tersebut diturunkan lebih teknis dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut kedua regulasi tersebut, terdapat pembatasan dalam bentuk pembatasan metode, teknis kampanye, dan jadwal kampanye. Terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang diperbolehkan regulasi Pilkada, yaitu: a. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; b. Penyebaran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU kepada umum; c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU; d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik; e. Pertemuan terbatas; f. Pertemuan tatap muka dan dialog; g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yaitu kampanye dalam bentuk: rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan/atau kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, path dan lain-lain). Waktu pelaksanaan rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir 18.00. Frekwensi pelaksanaan dibatasi, yaitu 2 kali untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota hanya dibatasi 1 kali saja.

Dengan dibatasinya metode kampanye pada 7 metode di atas, berarti pasangan calon atau Tim Kampanye tidak bisa mengagendakan kampanye diluar metode yang diperbolehkan regulasi. Masing-masing pasangan calon juga dilarang untuk

mengadakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye diluar yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon, baik yang mampu secara finansial maupun yang kurang mampu untuk dapat melaksanakan kampanye secara proporsional.

Sebagai implementasi dari pembatasan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, maka terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan APK dalam bentuk baliho ukuran 4 x 7 meter paling banyak lima buah bagi setiap pasangan calon untuk masing-masing kabupaten/kota, umbul-umbul ukuran 5 x 1,15 meter paling banyak 20 buah untuk setiap pasangan calon per kecamatan, dan spanduk ukuran 1,5 x 7 meter paling banyak dua buah setiap pasangan calon per desa.

Selain memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten/Kota juga memfasilitasi pembuatan Bahan Kampanye (BK) Pilkada Serentak Tahun 2015. Bahan Kampanye dimaksud, meliputi selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet dan poster. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU kabupaten/Kota, misalnya, kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan/atau stiker. KPU Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada wilayah Kabupaten/Kota untuk setiap Pasangan Calon. Materi dari bahan kampanye memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Di sisi lain, KPU Kabupaten/Kota juga melaksanakan fasilitasi iklan kampanye di media massa baik televisi, cetak dan radio.

Nilai-nilai profesionalitas yang harus dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota teruji pada masa kampanye ini, mengingat bahwa KPU Kabupaten/Kota diwajibkan mempersiapkan perencanaan desain, teknis pelaksanaan dan pemasangan APK serta pencetakan dan penyebaran Bahan Kampanye kepada publik. Hal ini dikarenakan regulasi mengamanatkan pemasangan APK menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota.

Perencanaan yang tidak tepat akan memunculkan persoalan di lapangan, di mana banyak keluhan ataupun laporan yang muncul dari masyarakat. Mulai dari pemasangan spanduk atau baliho berukuran besar yang memenuhi space ruang publik sehingga pemasangannya cenderung kurang rapi dan kurang memenuhi estetika (terutama jika pasangan calonnya lebih dari 2 pasangan calon), pemasangan APK yang sebagian juga terlambat pada sisi pemasangannya, APK mengalami kerusakan atau hilang, hingga banyaknya bermunculan APK yang bukan berasal dari KPU Kabupaten/Kota dan dipasang di tempat/lokasi yang dilarang.

Selain persoalan APK, KPU Kabupaten/Kota juga menghadapi banyak komplain dari masyarakat terkait Bahan Kampanye yang menempel pada tiang-tiang

listrik/telepon, jembatan, di pepohonan dan sejenisnya. Ini tentunya bisa merusak fungsi, mengurangi keindahan, bahkan mengotori lingkungan yang diperuntukkan publik. Di sisi lain, banyak pula Bahan Kampanye yang mengalami salah cetak dari percetakan maupun Bahan Kampanye yang terlambat atau tidak terdistribusikan oleh masing-masing pasangan calon sehingga masyarakat atau target pemilih banyak yang tidak tersentuh. Akibatnya, KPU Kabupaten/Kota kembali disalahkan karena dianggap tidak profesional dan kurang memberikan sosialisasi kepada pasangan calon dan Tim Kampanye terkait teknis aturan pendistribusian Bahan Kampanye.

Di sisi lain, muncul juga penilaian dari sejumlah pihak bahwa kampanye yang difasilitasi oleh KPU merupakan proses demokrasi yang tanpa euforia pemilu, karena ada batasan-batasan yang terlampau rigid terkait APK, Bahan Kampanye, Debat Publik dan iklan di media massa. Akibatnya, jangkauan kampanye menjadi terbatas, dan masyarakat pedalaman pun sulit mendapatkan akses pada kampanye. Dari pihak pasangan calon, kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini dinilai menyempitkan metode kampanye yang masif dan tidak efektif.³

Lantas bagaimana solusi terbaik terkait carut marut persoalan kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini? Untuk menjawab ini, diperlukan kesepakatan bersama dari banyak pihak untuk mencari jalan keluarnya. Dalam hal ini, baik pemerintah, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat memiliki perannya masing-masing:

³<http://kpud-sidoarjo.go.id/index.php/kpu-sidoarjo> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2016, pukul 20:45)

a) Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang/regulasi, mau tidak mau harus melakukan revisi terkait Peraturan Perundang-undangan yang masih menimbulkan banyak polemik.

b) KPU sebagai penyelenggara Pemilu, harus mampu mengejawantahkan aturan perundang-undangan yang disusun pemerintah tersebut ke dalam peraturan teknis yang aplikatif di lapangan. KPU juga harus tanggap dengan masih banyaknya kelemahan yang ada dalam regulasi kampanye di Pilkada Serentak Tahun 2015 yang perlu untuk direvisi. Sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinilai masih memiliki kekurangan dan berpeluang menimbulkan konflik. misalnya, belum adanya ketentuan akan definisi kampanye, intepretasi yang berbeda terhadap lokasi pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU, masih belum adanya uraian fasilitas negara yang terinci dengan jelas, terbatasnya penyiaran kegiatan debat publik hanya pada lembaga penyiaran publik, ketidakjelasan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran kampanye serta penegasan mengenai ruang lingkup dari unsur-unsur kampanye. pelanggaran-pelanggaran dalam masa kampanye merupakan ranah dan wewenang Panwaslih untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

c) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Peraturan KPU, harus mampu membuat perencanaan yang memperhatikan kondisi dan dinamika di wilayahnya

masing-masing. Sebagai contoh, ketika menentukan ukuran APK, KPU Kabupaten/Kota tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek kepuasan peserta Pemilu, tapi juga harus memperhatikan aspek geografis di tingkat kecamatan dan desa masing-masing.

- d) Panwaslu harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, mengingat bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam masa kampanye merupakan ranah dan wewenang Panwaslih untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
- e) Peserta Pemilu harus memahami bahwa aturan main kampanye yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU, merupakan payung hukum yang harus dipatuhi. Sebagai calon pemimpin daerah, selayaknyalah para kandidat memberikan contoh untuk taat pada regulasi yang berlaku, dan perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan teknis dan jadwal kampanye, pembatasan metode-metode kampanye diarahkan untuk penataan berdasar prinsip kampanye yaitu jujur, terbuka dan dialogis serta untuk mengembalikan kampanye sesuai esensinya, yaitu sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kepatuhan setiap kandidat akan memberi manfaat bukan hanya bagi kandidat tetapi juga bagi upaya kita bersama mewujudkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau sarana demokrasi, menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
- f) Masyarakat juga harus berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu, menjadi pemilih yang aktif dan mengawal seluruh proses tahapan Pemilu.

Dalam hal ini batasan penelitian didasarkan pada Kecamatan Krembung, dikarenakan tingkat antusias masyarakatnya tinggi. Sedang Kecamatan Wonoayu dan Jabon itu perolehan suara terbanyak oleh pasangan Bersinar yaitu Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin.

B. Gambaran Umum Pilkada Sidoarjo 2015

Gambaran umum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini seiring dengan disetujuinya revisi Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Adapun 11 poin yang direvisi dalam UU Pilkada No. 1 tahun 2015 antara lain:

- a. Tentang pemilihan secara berpasangan atau tidak, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati berpasangan secara paket.
- b. Tentang uji publik. Komisi II dan pemerintah menyetujui proses sosialisasi calon kepala daerah ini dihapus. Fungsi sosialisasi calon dapat dijalankan oleh partai politik.
- c. Penguatan pendelegasian tugas KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu tetap sebagai penyelenggara pemilihan, dengan beberapa perubahan atau penguatan fungsi.
- d. Tentang persyaratan usia dan pendidikan pasangan calon. Komisi II dan pemerintah tetap menyetujui syarat minimal 30 tahun untuk gubernur/wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati/wakil bupati. Pendidikan minimal calon baik gubernur/wagub dan bupati/wabup, adalah SLTA.

- e. Syarat dukungan perseorangan ditingkatkan 3,5 persen sehingga kisarannya setiap calon kepala daerah didukung 6 sampai 10 persen dari jumlah penduduk.
- f. Tentang ambang batas kemenangan bagi calon, ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Sehingga cukup sekali pemilihan mengingat efisiensi dari segi waktu dan anggaran. Jika diperoleh hasil sama, maka penentuan pemenang didasarkan pada luas persebaran perolehan suara.
- g. Tentang Pilkada serentak. Komisi II dan pemerintah setuju akan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015. Kedua, Februari 2017. Ketiga, Juni 2018 dengan peserta yang masa jabatannya habis 2018. Pilkada serentak nasional akan terealisasi pada 2027.
- h. Masa jabatan peralihan akan diisi oleh pejabat pemerintah daerah. Gubernur diisi pejabat madya, sedang bupati pejabat pratama.
- i. Syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah dipidana. Keputusan Komisi II dan pemerintah ini disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
- j. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, maka perselisihan hasil pemilihan ditangani MK.
- k. Tentang pendanaan pilkada, anggaran penyelenggaraan pemilihan dibebankan pada APBD serta dapat didukung APBN.⁴

⁴<http://www.infosidoarjo.com/politik-pemerintahan/pilkada-sidoarjo-dipastikan-desember-2015> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 11:00)

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada di Kabupaten Sidoarjo

Pada pilkada 2015 pasangan calon Bupati dan wakil bupati itu ada empat pasangan diantaranya:

Pada urutan pertama pasangan calon kandidat SIDOARJO HATIKU yaitu H. Mg. Hadi sutjipto S.H., M.M. Dan H. Abdul kolik, S.E. Pasangan ini diusung oleh empat partai yang meliputi partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), partai nasional demokrat (NASDEM), partai Demokrat, partai bulan bintang (PBB).

Adapun visi misi dari pasangan calon kandidat antara lain:

Visi : Sidoarjo Maju, Sejahtera, dan Mandiri

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola dan mengolah potensi ekonomi lokal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, serta menghadapi era globalisasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 2) Mendorong tumbuh-kembangnya sektor industri dan jasa-perdagangan untuk menguatkan pondasi sumber pendapatan masyarakat, serta menggugah kepeduliannya agar berpartisipasi aktif dalam mengoptimalkan potensi pariwisata untuk menggerakkan perekonomian lokal, termasuk membina UMKM dan Koperasi

- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat aktifitas ekonomi di masyarakat serta berkembangnya usaha berbasis kerakyatan berbasis swadaya (*home industri*).

- 4) .Memperkuat ikatan tali silaturahmi dan kebersamaan demi terpeliharanya kerukunan atau ketentraman antar umat beragama, serta ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.
- 5) Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat agar proses pembangunan bergerak secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan gender.
- 6) Meningkatkan sikap profesionalisme aperatur pemerintah agar mencapai pelayanan prima.
- 7) Memfasilitasi berkembangnya iklim investasi untuk mempercepat dan menguatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi serta kesejahteraannya.
- 8) Mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
- 9) Mewujudkan terpeliharanya iklim demokrasi yang santun dan menjunjung tinggi etika bermasyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Table 3.4
Profil Calon Bupati

Nama lengkap	H. MG. HADI SUTJIPTO, S.H., M.M.
Tempat / Tanggal Lahir	Surakarta, 06 Oktober 1955
Usia	60 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Teuku Umar No. 6, Sidoarjo

Table 3.5
Profil Wakil Bupati

Nama lengkap	H. ABDUL KOLIK, S.E.
Tempat / Tanggal Lahir	Sidoarjo, 12 April 1970
Usia	45 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Ds. Bulang RT 3 RW 11, Kec. Prambon, Sidoarjo

Untuk pasangan calon urutan nomer dua USWATAN yaitu H. Utsman Ikhsan dan Ida Astuti, S.H. Pasangan ini diusung oleh dua partai yaitu partai gerakan Indonesia raya (GERINDRA) dan partai keadilan sejahtera (PKS).. Adapun visi dan Misi pasangan tersebut yang meliputi:

Visi:Menjadikan Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri Adil dan Sejahtera

Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan, peningkatan pelayanan serta perbaikan sarana dan prasarana kesehata.
- 2) Mengutamakan pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 3) Mendorong pembangunan perekonomian daerah pada semua sektor, dengan memproiritakan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak serta peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Memberikan layanan masyarakat secara profesional dengan penataan aparatur yang benar untuk mencapai pelayanan prima.
- 5) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram, dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyatakat yang kondusif.

Tabel 3.6
Profil Calon Bupati

Nama lengkap	. H. UTSMAN IKHSAN
Tempat / Tanggal Lahir	Surabaya, 03-03-1953
Usia	62 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Raya 137 Seruni Gedangan Sidoarjo

Tabel 3.7
Profil calon wakil Bupati

Nama lengkap	IDA ASTUTI, SH
Tempat / Tanggal Lahir	Tulungagung, 13 Juli 1968
Usia	47 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Perum Griya Citra Asri RM 29/14 Sememi, Benowo, Surabaya

Untuk pasangan calon urutan nomer tiga BERSINAR yaitu H. Saiful Ilah, SH., M.Hum. dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. Pasangan ini hanya diusung oleh partai kebangkitan bangsa (PKB). Adapun visi dan Misi pasangan tersebut yang meliputi:

Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan

Misi:

- 1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
- 2) Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.

- 4) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
- 5) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tabel 3.8
Profil Calon Bupati

Nama lengkap	H. SAIFUL ILAH, S.H., M.Hum
Tempat / Tanggal Lahir	Sidoarjo, 09-08-1949
Usia	66 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Malik Ibrahim No.45 RT.01 RW.01 Pucang Anom Sidoarjo

Tabel 3.9
Profil Wakil Calon Bupati

Nama lengkap	H. NUR AHMAD SYAFUDDIN, S.H.
Tempat / Tanggal Lahir	Sidoarjo, 15 Oktober 1963
Usia	52 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Brigjen Katamso 58 Janti Waru Sidoarjo

Dan yang keempat Untuk pasangan calon urutan nomer empat WANI yaitu Warih Andono, S.H. Dan H. Imam Sugiri, S.T, M.M. Pasangan ini diusung oleh dua partai yaitu partai golongan karya (GOLKAR) dan partai amanat nasional (PAN).

Adapun visi misi dari pasangan urut nomer 2 antara lain:

Visi: Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Berkesinambungan

Misi:

- 1) Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
- 2) Mendorong pembangunan di sembilan sektor perekonomian daerah, dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang paling potensial guna mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara layak.
- 3) Memberikan layanan masyarakat secara profesional untuk mencapai pelayanan prima.
- 4) Memfasilitasi pembangunan infrastruktur guna mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan perkapita guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berwawasan gender dan pengamalan nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar negara secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- 7) Mewujudkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang aman, tentram dan tenggang rasa guna terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.
- 8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika bermasyarakat
- 9) Penegakan supremasi hukum disegala bidang

Tabel 3.10
Profil Calon Bupati

Nama lengkap	WARIH ANDONO, S.H.
Tempat / Tanggal Lahir	Purbalingga, 26 April 1970
Usia	45 tahun
Alamat Tempat Tinggal	Jl. Anggrek 20 RT. 001 RW. 003 Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo

Tabel 3.11
Profil Wakil Calon Bupati

Nama lengkap	H. IMAM SUGIRI, S.T., M.M.
Tempat / Tanggal Lahir	Sidoarjo, 4 Maret 1964
Usia	51 tahun
Alamat Tempat Tinggal	RT.10 RW.02 Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo

Sumber : Kpud.sidoarjo.go.id

Sedangkan pada periode 2011-2016 Struktur kepengurusan partai kebangkitan bangsa (PKB) yang mengusung Calon Petahana itu terdiri dari Mutasyar, Dewan Syuro, Dewan Tahfiz, Sekretaris, Bendahara serta Anggota-anggotanya.⁵

2. Komunikasi politik Calon Petahana dengan Calon Non Petahana

Komunikasi yang dilakukan salah satunya pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan wakil Bupati tahun 2015 di Sidoarjo. Pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin merupakan pasangan *incumbent*. Dimana Saiful Illah merupakan mantan Bupati Sidoarjo periode 2010-2015. Pasangan *incumbent* memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan

⁵Struktur Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo tahun 2011- 2016 selengkapanya terlampir.

dengan pasangan *non-incumbent*, seperti popularitas, citra, penguasaan opini di masyarakat serta penguasaan opini yang ada di media massa, dan persiapan *finansial*, serta pemahaman karakteristik pemilih.

Berdasarkan pandangan pemerintah dan berbagai anggota dari partai bahwasannya saat melakukan komunikasi politik dalam bentuk media komunikasi yaitu dengan memasang reklame disalah satu apartemen. Mereka beranggapan bahwa Saiful Illah memiliki kerjasama dengan pengusaha apartemen tersebut. Seperti yang di tegaskan oleh salah satu politisi partai Golkar “khawatirnya tudingan ikut memasarkan apartemen itu muncul pada penilaian masyarakat”. Bahkan sebelumnya, pasca Bupati Sidoarjo Saiful Ilah nampang di iklan apartemen, banyak sorotan muncul di media sosial.⁶

Diluar itu pasangan petahana ini memiliki banyak sisi positif dibandingkan sisi negativenya. Karena sudah banyak yang berpendapat bahwasannya pasangan ini membawa dampak positif bagi Sidoarjo meskipun belum keseluruhan mengalami perubahan, karena jika kita teliti lebih dalam lagi bahwasannya masih ada desa-desa yang belum dicakup oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu bagi partai yang mengusung pasangan ini yaitu partai PKB mereka beranggapan bahwasannya Saiful ilah sudah sangat membawa dampak yang bagus bagi partai PKB terutama PKB Sidoarjo karena selama Saiful Ilah menjabat, partai PKB Sidoarjo hanya menganggap Saiful Ilah lah yang pantas menjadi ketua dan mampu membuat partai PKB Sidoarjo

⁶ surabayanews.net/jadi-bintang-iklan-dprd-sidoarjo-soroti-saiful-ilah, (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016, pukul 13:45)

menjadi sukses meskipun ada beberapa kader muda PKB yang berpotensi, seperti Sullamul Hadi Nurmawan (Ketua DPRD Sidoarjo) maupun Nur Achmad Syaifudin (wakil bupati), juga tidak maju dikarenakan mereka merasa Saiful Ilah yang lebih pantas dan pasti akan memenangkan kembali.⁷

⁷ koran-sindo.com/news, (Diakses pada 14-08-2016, pukul 13:50)

BAB IV

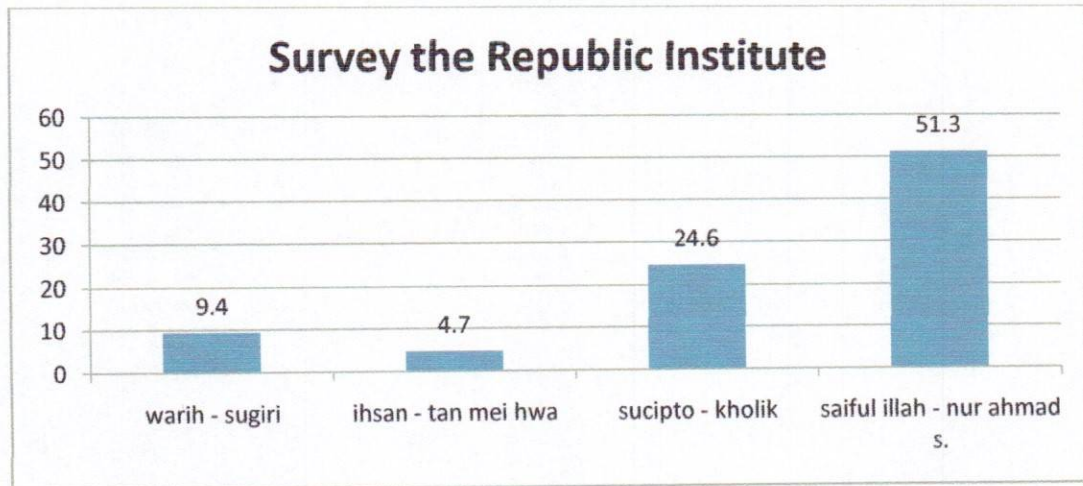
PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Komunikasi politik Calon Petahana di kabupaten Sidoarjo

Komunikasi politik merupakan salah satu instrument penting bagi seorang calon kandidat yang akan maju mencalonkan sebagai seorang pemimpin. Karena dengan komunikasi politik yang baik seorang calon pemimpin dapat menarik simpati masyarakat untuk memilih calon pemimpin bagi pemimpin mereka di masa yang akan mendatang. Hal ini tercemin juga pada salah satu calon pemimpin untuk tingkat kabupaten (Bupati) di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Saiful Illah yang dikenal dengan sebutan Abah Ipul.

Saiful Illah merupakan satu-satunya calon petahana yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Alasan Saiful Illah maju kembali pada pilkada 2015 karena survey tentang elektabilitas pasangan calon Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin mendapat respon tertinggi dari pasangan calon yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1



Sumber: hasil olahan peneliti 2016

Dengan hasil survey di atas Saiful Illah selaku calon petahana mencalonkan kembali pada periode 2016-2021 dengan jargonnya Sidoarjo Bersinar. Selain itu, Saiful Illah mencalonkan kembali karena diukung oleh fraksi PKB. Alasan anggota dari fraksi PKB mengukung Saiful Illah karena merupakan ketua DPC dari partai PKB sekaligus merupakan penduduk asli Sidoarjo. Setiap kandidat sudah pasti memiliki visi dan misi masing-masing, seperti yang dikatakan oleh bapak Misbah:

“Visi misi saiful illah itu udah sesuai mbk, masyarakat kan juga ingin sejahtera, apalagi jika visi-misinya itu terealisasi. Itu sudah cukup mbk buat saya dan pasti saya akan memilih Abah Ipul.”

Adapun Visi yang diukung oleh Saiful Illah adalah Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan. Visi tersebut mengandung

tiga unsur pokok visi utama, yaitu **"Mandiri"**, **"Sejahtera"** dan **"Berkelanjutan"**. Makna dari tiga unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Mandiri: artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- Sejahtera: artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan, baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur misi ini menegaskan Pasangan Calon Bupati H. Saiful Ilah, SH., M.Hum dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadaan sosial budaya, keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kabupaten Sidoarjo.
- Berkelanjutan: adalah proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi

masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climed change*.

- Sedangkan Inovatif : merupakan perspektif kerja dan spirit pasangan Bersinar yang menjadi pondasi pada implementasi ketiga unsur Visi di atas, yaitu "mandiri", "sejahtera" dan "berkelanjutan". Perspektif dan spirit baru ini akan memberikan irama dan tenaga baru bagi segenap lini eksekutif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-cita pembangunan kab. Sidoarjo.

Misi Pasangan Calon Bupati H. Saiful Ilah, SH., M.Hum dan H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH. merupakan operasionalisasi dari Visi "KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN". Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

"Inovatif"
<p>"Inovatif" merupakan perspektif kerja dan spirit pasangan Bersinar yang menjadi pondasi pada implementasi ketiga unsur Visi di bawah, yaitu "mandiri", "sejahtera" dan "berkelanjutan". Perspektif dan spirit baru ini akan memberikan irama dan tenaga baru bagi segenap lini eksekutif dalam menciptakan terobosan-terobosan baru guna mewujudkan cita-</p>

cita pembangunan kab. Sidoarjo.	
Unsur Visi	Misi
"Mandiri"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
"Sejahtera"	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan. 4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
"Berkelanjutan"	<ol style="list-style-type: none"> 5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, penjabaran lebih detil terhadap masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat.

Aspiratif, partisipasif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan/ terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang adil dan merata yang merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan

meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Peningkatan perekonomian daerah melalui pendekatan ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan yang mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan agar nilai tambah produk lebih optimal (PDRB). Untuk itu diperlukan kerja keras berbagai pihak, dan berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun. Guna mendorong Kabupaten Sidoarjo sebagai kota produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi yakni dengan melalui penguatan sentra-sentra industri atau produk unggulan industri sesuai potensi daerah dengan meningkatkan penyebaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan/pendidikan, serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Hal ini akan berdampak pada semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk dapat meningkatkan investasi untuk peningkatan kualitas pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.

Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah Peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan sumberdaya manusia

yang cerdas dan berkualitas dengan dasar penuntasan wajib belajar 12 tahun. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun. Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, dan bermoral, tanggap lingkungan dan memiliki skill (*hard* dan *soft skill*) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di tengah masyarakat dengan baik, mampu menjadi agen perubahan ke arah nilai-nilai yang baik.

Upaya tersebut didampingi dengan peningkatan mutu dan fasilitas penunjang untuk bisa mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota wiyata mandala. Guna mengatasi masyarakat yang putus sekolah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan pendidikan non formal dengan sasaran utama pembebasan masyarakat dari buta aksara. Sumberdaya manusia yang berkualitas berarti juga memiliki nilai-nilai religius yang dapat memanfaatkan keilmuan untuk mewujudkan kesalehan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan difokuskan pada:

- a. Pelayanan Kesehatan yang terjangkau, terutama penyediaan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sidoarjo
- b. Pendidikan gratis dan Berkualitas untuk warga Kabupaten Sidoarjo
- c. Perluasan Kesempatan Kerja dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat kerirausahaan (*etrepneurship*) bagi angkatan kerja.
- d. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin terutama kecukupan energi, air bersih dan keschatan lingkungan.

Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat maupun aparatur pemerintah baik formal maupun non formal yang memiliki kompetensi dan tingkat keschatan yang baik, berbudi luhur yang didasari keimanan dan ketaqwaan sehingga mampu bersaing serta menciptakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Indikator peningkatan kualitas sumberdaya manusia diindikasikan dengan membaiknya Kesejahteraan rakyat yang terus meningkat. Berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem

pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif.

4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME. serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berbudi pekerti, keimanan kepada Tuhan YME merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Sidoarjo seutuhnya. Pada

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengelolaannya masyarakat menjadi lebih mendekatkan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dan keyakinan dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama. Pengelolaan tatanan kehidupan masyarakat ini mengedapankan keselarasan kehidupan sosial politik masyarakat yang berkeadilan dengan menjamin kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban

dalam berbagai bidang serta memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

5. Kualitas Infrastruktur publik yang memadai sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Penyediaan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang berkualitas yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEKS, peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas

umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infratsruktur yang memperhatikan keteraturan, harmonisasi dengan lingkungan sekitar dan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi masal, listrik, air bersih, sekolah, lokasi perdagangan yang terpadu. Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilaksanakan pada daerah di pusat kota melainkan juga pada daerah pinggiran dan daerah industri pada daerah pinggiran untuk terwujudnya

pemerataan pembangunan di semua wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat berkembang menjadi kota Metropolitan.

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur tersebut meliputi sarana-prasarana: jalan dan jembatan; perumahan; lingkungan, perekonomian; kesehatan; pendidikan; sosial dan budaya; air bersih; ketahanan pangan; berfungsinya ruang terbuka hijau dan peribadatan. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera yakni lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi. Peningkatan infrastruktur yang baik untuk memfasilitasi jalannya roda ekonomi dan membuat kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo. Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan pemanfaatan ruang dan program kewilayahan. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah. Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan hidup sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik di masyarakat sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan dapat ditekan. Sidoarjo yang hijau dan bersih dapat diupayakan terwujud dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat bencana daerah sedini mungkin dilakukan sehingga masyarakat tetap memiliki rasa kewaspadaan bencana yang tinggi.

B. Komunikasi Politik dan Strategi politik Calon Petahana dalam Memenangkan pilkada di Kabupaten Sidoarjo

Data-data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan hasil di lapangan, secara sistematis disusun untuk menjelaskan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Beberapa Informan yang bisa ditemui, di mohon kesanggupan dan kesiapannya untuk di wawancarai oleh peneliti sehingga dapat menggali data darinya baik dari salah satu anggota partai pengusung, tim sukses maupun masyarakat yang sudah memiliki hak suara di Kabupaten Sidoarjo.

Data yang kami peroleh dari beberapa informan (subjek) peneliti tentang komunikasi politik calon petahan dalam memenangkan pilkada 2015 di Kabupaten Sidoarjo adalah berdasarkan tiga kelompok. Alasan peneliti membagi data berdasarkan rumusan masalah karena dapat memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Strategi Komunikasi politik Calon Petahana Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015.

Dalam pilkada tahun 2015 kabupaten sidoarjo dari fraksi PKB mengusung Abah Ipul sebagai calon kandidat dalam pemilu kali ini, selain itu abah ipul merupakan calon petahana. Alasan anggota dari fraksi PKB mengusung abah ipul karena merupakan ketua DPC partai PKB, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan cak nur yang mengatakan bahwa

“Ya, di teman-teman PKB, PKB itu adalah partai pemenang pemilu dan satu-satunya partai yang bisa mengusung dan yang lain itu harus koalisi kan ya? Yang kedua Abah Saipul itu Ketua DPC PKB Sidoarjo ketua partai pemenang. Yang ketiga abah Saiful itu adalah Incumbent dimana secara aturan masih diperbolehkan untuk maju kembali untuk satu periode kedepan. Yang keempat itu pengalaman, Abah Saipul itu sudah dua periode wakil Bupati ya kan? 2005-2010, satu periode Bupati jadi 15 tahun duduk sebagai pimpinan Kabupaten di Sidoarjo. Dan yang kelima beliau adalah penduduk asli Sidoarjo pribumi Berhasil dan sangat tinggi elektabilitasnya di Kabupaten Sidoarjo. Hampir seluruh masyarakat sidoarjo itu mengenal beliau. Survey-survey mengatakan “hampir tembus diatas 90%. Masyarakat Sidoarjo kalo ditanya, Kenal gak dengan Abah Saipul? dan pasti jawabannya kenal.”¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan sebenarnya itulah beberapa alasan khusus mengapa dari fraksi PKB mengusung kembali Abah saipul di pilkada 2015, walaupun masih banyak alasan umum lainnya. Dan popularitas juga penting untuk seorang pemimpin.

Dalam calon Kandidat dari fraksi PKB bahwasanya Saiful Illah merupakan calon tunggal yang diusung oleh PKB. Demikian penuturan bapak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Nasih selaku Tim Sukses dari pasangan BERSI GAK sebagai berikut

Untuk W1 (kepala daerah) tidak ada hanya calon tunggal hanya Abah Saipul saja, kita kemaren hanya membuka untuk yang W2 pendaftaran calonnya ada 9 yang daftar dengan berbagai proses yang panjang bla... bla... bla... sampai tingkat pusat dan kepilihlah Cak Nur Ahmad sebagi pendamping beliau di W2 kalo W1 nya itu satu saja.²

¹ Wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih selaku sekertaris Tahfidz DPC Partai PKB serta Ketua Tim sukses dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang ditemui dikantor DPRD tanggal 20 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

² Wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih selaku sekertaris Tahfidz DPC Partai PKB serta Tim sukses dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang ditemui dikantor DPRD tanggal 20 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

Menurut Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas. Yang pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian dan yang kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu

Dalam hal ini dapat terlihat dari track record abah ipul selama memimpin periode sebelumnya cukup baik, sejalan dengan penuturan bapak Abdillah Nasih yang mengatakan:

“Track record dan juga keberhasilan Abah Ipul selama memimpin insyaallah sangat luar biasa. Jadi penghargaan yang diterima selama masa kepemimpinan beliau kemarin itu ditahun periode pertamanya menjadi Bupati itu hampir 200 an lebih penghargaan yang beliau terima atas keberhasilan itu. Disamping itu juga kemampuan beliau untuk menarik investasi sehingga salah satu penghargaan itu adalah investment award. Ketika terjadi kasus lumpur lapindo, banyak orang mengatakan Sidoarjo koleps y kan?sidarjo akan banyak mengalami kebangkrutan kerugian dan lainnya karena terkena pengaruh oleh luapan lumpur lapindo. Banyak perusahaan-perusahaan yang akan henggang mungkin!banyak investasi yang akan mundur dan macam-macam, dianggap dulu Sidoarjo akan tenggelamya kan? Tetapi Alhamdulillah berkat beliau justru investasi malah banyak yang masuk. Sehingga salah satu penghargaannya adalah memperoleh investment award.yang kedua juga termasuk Abah saipul itu mampu menaikkan pendapat daerah.”

Dengan demikian treck record yang di dapat oleh Saiful lilah yaitu meliputi 200 an penghargaan serta investment award dan mampu menaikkan pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Jika demikian maka abah saipul merupakan calon kandidat yang cukup tepat untuk ikut bertarung dalam pilkada tahun 2015. Namun

selain melihat dari track record sang calon, maka perlu adanya sosialisasi yang perlu dilakukan untuk memenangkan pemilu.

Menurut Nimmo, sikapnya terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif, setiap komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari penuturan Bapak Nasih

“Cara kita mbk ya...ada tiga pola, satu adalah pola opini, ya kan... jadi e... kebijakan opini ataupun gerakan opini. Gerakan opini itu dari mulai penyebaran pamflet, brosur, kemudian apa? Ke media dimana untuk menyampaikan pesan-pesan moral kampanye lewat edaran tersebut, ya kan... siapa Abah Saipul, siapa Cak Nur, apa programnya, nah itu satu strategi. Yang kedua adalah melakukan gerakan pendekatan e.. lewat jam'iyah, durba langsung kepada jamaah-jamaah kita ya..kan..emmm small class group misalkan “bahasa inggrisnya” kalo struktur yang pertama tadi, gerakan struktur berarti yak e jamaah, jam'iyah, ke diba' kubro, ke istighosah langsung turun ke beliau sama tim kita. Kita bentuk tim khusus, kalo sekiranya kita jadwal satu hari ini ya? Siapa, kesana, abah kemana, tim kemana, kita jawab semuanya disini. Disamping itu juga menerima undangan masuk kita kirim itu. Demikian juga kaki dua sama, menghadapi kesana, datang kesana mengumpulkan ini suka relawan bla...bla...bla...macam-macam seluruh komponen masyarakat kita kumpulkan. Yang terakhir setidaknya ada gerakan strategi yang mengikuti alur kebijakan kpu ya...yang kedua ini kita format internal ya kan ya...? Yang kedua adalah kita ngikutin e polese atau kebijakan kpu semacam kampanye akbar, ya..kemudian dialog, debat, macam-macam dimana disitu termasuk juga untuk adu argumentasi ataupun kemampuan dan pengenalan dari kita dari masing-masing calon.”³

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya seorang komunikator itu mempunyai cara sendiri untuk menarik simpati ataupun partisipasi dari masyarakat agar dapat

³ Wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih selaku sekretaris Tahfidz DPC Partai PKB serta Tim sukses dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang ditemui di kantor DPRD tanggal 20 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

memenangkan pilkada kali ini. Adapun bentuk-bentuk atau cara sosialisasi saiful Illah untuk menarik simpati masyarakat itu ada tiga pola diantaranya:

1. Pertama menggunakan gerakan opini, gerakan opini adalah suatu cara yang dilakukan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuka, yang meliputi pamflet, brosur serta media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan moral lewat kampanye tersebut.
2. Yang kedua gerakan pendekatan. Gerakan pendekatan yang dilakukan oleh calon petahana meliputi pendekatan dengan jam'iyah durba⁴, serta *small class group* (kelompok kelas kecil) diantaranya jamaah, jam'iyah, diba' kubro⁵, serta istighosah.
3. Yang ketiga itu, gerakan strategi dimana gerakan strategi ini dilakukan sesuai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dengan kebijakan dari KPU. Salah satunya dengan cara mengadakan seperti kampanye akbar, dialog, debat, adu argumentasi ataupun kemampuan dan pengenalan dari masing-masing calon. Dengan hal ini tim khusus juga menghadirkan Saiful Illah dalam acara tersebut.

⁴ Jam'iyah durba adalah kumpulan lansung

⁵ Diba' kubro adalah pengajian kitab besar yang biasanya diselenggarakan di pondok-pondok pesantren

Menurut Nimmo, khalayak komunikator politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan *feedback* dalam suatu proses komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Dalam hal ini untuk memperlancar kandidat dalam memenangkan pilkada tahun 2015 seorang komunikator yakni abah ipul juga mempunyai komunikasi politik yang cukup efektif yang sesuai hasil wawancara dengan bapak Abah Shodiq.

Efektif, karena beliau itu mendatangi acara saat pengajian di desa saya, dan saat kampanye beliau juga membagikan kerudung pada setiap waraga perempuan dan yang laki-laki dibagikan kopyah. kemudian pada acara jalan sehat atau dalam kata lain menurut warga desa yaitu jantung sehat yang diadakan oleh tim sukses abah Ipul, tim sukses membagikan kaos dari pasangan abah Ipul dan Cak Nur yang bekerja sama dengan anak-anak KKN yang ada pada saat itu. Setelah stok kaos yang dibagikan habis, tim sukses dari Abah Ipul membagikan doorprice kepada warga yang belum menerima kaos, berupa uang tunai 1 juta dibagi untuk dua orang warga, masing-masing 500 ribu.⁶

Selain komunikasi yang efektif. Menurut Leonard, Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya. Ia sendiri memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalanya, pengalamannya sebagai

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Shodiq warga Kecamatan Krembung pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi. Dalam hal ini diperkuat oleh penuturan yang disampaikan oleh salah satu warga:

Dalam komunikasi politik Abah Ipul mbk...beliau itu bisa menyesuaikan diri dari berbagai kalangan masyarakat, ya mulai dari kyai-kyai pesantren, pemuda-pemuda, serta orang-orang korak (orang nakal).⁷

Selanjutnya, Ketua Pelaksana Harian tim pemeringan pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin juga mengatakan hal yang sama:

Masyarakat satu dengan yang lainnya kan pasti memiliki perbedaan. Baik dari cara berbicara ataupun yang lainnya. Pihak kami ketika berdialog dengan masyarakat selalu disesuaikan dengan ciri atau karakter mereka. bahasa yang mudah dipahami. Sehingga mereka ketika berbicara dengan kami pun akan lebih enak. Karena dengan kita memahami mereka, pada nantinya mereka juga bisa memahami apa yang kami sampaikan.⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas memperkuat alasan peneliti bahwasannya komunikasi yang dilakukan Saiful Illah merupakan tergolong yang efektif. Hal ini didasarkan pada kemampuan Saiful Illah sebagai seorang komunikator bisa membaur terhadap hampir ke semua kalangan. Seperti kyai-kyai, pemuda-pemudi, hingga pada kalangan anak-anak nakal.

Selanjutnya menurut Karl von Clausewitz berpendapat strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedang perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal warga Sidoarjo pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 13:30 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Imam pada tanggal 19 Juli 2016 puku 09:30

umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi, social-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Strategi pemenangan adalah suatu cara yang sistematis dan tersusun dengan jelas, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenangkan partai politik atau individu yang akan maju di dalam pemilihan umum. Strategi pemenangan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah yang di tempuh oleh partai politik atau individu dalam mensosialisasikan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan pada masyarakat baik itu dengan cara *ofensif* maupun *defensif* dalam rangka memenangkan partai politik atau kandidat di dalam pemilihan umum.

Setiap pasangan yang akan maju dalam pemilihan umum tentu memiliki strategi-strategi tersendiri yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan dukungan secara penuh. Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin merupakan pasangan yang *Incumbent*. Dimana pasangan *Incumbent* memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya dari segi popularitas di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, tim pemenangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin tetap menyusun strategi pemenangan.

Strategi pemenangan pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin pada Pilkada Serentak tahun 2015 berbeda dengan sebelumnya. Pada Pilkada sebelumnya pada tahun 2010 stretegi pemenangan menekankan pada segi memperkenalkan calon kandidat kepada pemilih, sedangkan pada Pilkada tahun 2015 lebih menekankan pada

segi memperkenalkan visi-misi serta program-program yang akan dijalankan untuk kedepannya. Strategi untuk pemenangan pada Pilkada tahun 2015 lebih mudah jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2010, hal ini dikarenakan masyarakat Sidoarjo sudah mengenal Saiful Illah. Tingkat kepopuleran Saiful Illah yang tinggi ini, memberikan keyakinan yang cukup besar kepada tim pemenangan dapat memperoleh kemenangan. Dengan kata lain, strategi pemenangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin pada Pilkada tahun 2015 menggunakan cara bertahan.

Cara yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin yaitu dengan sosialisasi penuh visi-misi dan program-program serta kampanye langsung ke masyarakat. Hal ini diungkap oleh Dhamroni selaku tim pemenangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifuddin,

“Strategi untuk Pilkada tahun 2015 ini menekankan pada visi-misi dan program jangka pendek maupun jangka panjang misalnya pelayanan kesehatan gratis, biaya pendidikan gratis sampai SMP dan sebagainya serta kampanye langsung ke masyarakat. Mengingat pak Saiful sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk kampanye langsung tim pemenangan beserta pak Saiful dan Pak Nur datang langsung ke masyarakat, berbincang-bincang dengan masyarakat diberbagai tempat.”⁹

Dalam hal sama juga diperkuat dengan penuturan tim sukses dari pasangan Abah Ipul dan Cak Nur, bapak Nasih,

“Kalau strategi pemenangan ya dengan memperkenalkan visi-misi dan program-program yang akan dijalankan ke depan serta program yang sebelumnya belum tercapai dilanjutkan. Kemudian Kampanye langsung ke masyarakat.”

⁹ Wawancara dengan Bapak Dhamroni selaku Tim pemenangan dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 pada tanggal 13 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB.

Pernyataan dari tim pemenangan pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin di atas menunjukkan bahwa strategi pemenangan menekankan pada proses memperkenalkan visi-misi dan program serta Kampanye langsung. Mengingat sebagai pasangan *incumbent* sudah memiliki tingkat kepopuleran yang cukup tinggi dikalangan masyarakat Sidoarjo. Dalam hal ini juga dilihat dari penuturan Bapak Nasih terkait strategi politik yang dilakukan oleh calon petahana sebagai berikut,

“Strateginya kita punya dua jalur ya kan?, satu adalah tim sukses ataupun gerakan struktur dan satu kakinya lagi adalah gerakan non struktur. Gerakan struktur itu meliputi partai pungsung yakni PKB dan banom-banomnya, NU dan banom-banomnya ya muslimat, fatayat, ashor, ipnu, ippnu dan seluruh keluarga besar PKB dan NU ini satu bagian khusus. Di kaki satu ini, di struktur ini, kita punya komandan punya struktur, punya tim khusus, punya gerakan, punya program, yang bagaimana tetap mensolidkan suara Abah saipul suara calon kita di keluarga besar. Dari mulai jamiyah, qubro, ya kan? Dan kemudian hal-hal yang terkait masalah rutinitas ataupun apa namanya? Emmm... kebudayaan PKB dan NU ini di satu sisi plus dari mulai ranting, desa, sampai kepada kabupaten. Di kaki yang kedua non struktur itu adalah partai-partai pendukung, ORMAS, UKP, LSM, relawan, pengusaha, birokrasi, itu di wilayah kaki satunya. Ini juga sama kita punya program yang berbeda, gerakan yang berbeda, tim yang berbeda, nah...yang tujuannya sama adalah bagaimana mengenalkan dan menambah ya kan... kalo ini memperkuat yak an... ini adalah menambah basis suara yang kita miliki kepada pasangan kita ini disinilah biasanya terjadi perebutan suara dengan calon-calon yang lain kalo di keluarga besar PKB dan NU Alhamdulillah solid, kita tinggal bagaimana merumat, meramung, dan memformat gerakan di tingkatan yang non struktur.”¹⁰

Jadi dengan demikian strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Saiful Illah/ tim suksesnya untuk menarik simpati ada dua strategi diantaranya; pertama gerakan struktur, gerakan struktur yaitu meliputi partai pangsung yakni PKB dan anggota-anggotanya, sedangkan yang kedua gerakan non struktur yang meliputi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih selaku sekretaris Tahfidz DPC Partai PKB serta Tim sukses dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang ditemui di kantor DPRD tanggal 20 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

partai-partai pendukung, ORMAS, UKP, LSM, relawan, pengusaha, serta orang-orang birokrasi.

Selain itu abah ipul juga menggunakan strategi pendekatan terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama, dimana tokoh agama diikutsertakan untuk mendukung abah ipul agar mengambil simpati masyarakat. karena hal tersebut sebagai batu loncatan untuk memenangkan pilkada tahun 2015 ini. Apabila sang calon mempunyai link banyak baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan elit politik jadi tidak menutup kemungkinan bisa dapat memboyong suara rakyat. hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Nasih:

Alhamdulillah, hampir dari semua link ada. Kalo tokoh-tokoh agama dari mulai opo? Nu struktur samapi kepada kultur, dari pimpinan kelembagaan sampai kepada perseorangan itu Alhamdulillah kemaren di back up, dari mulai pondok pesantren kemudian juga tokoh-tokoh kyai kampung, lokal, klompok-klompok syuriyah, kalo di kita itu di NU adalah klompok-klompok dewan syuro. Di PKB itu Alhamdulillah mendukung semuanya, bunyai muballigh kumpul jadi satu juga, deklarasi mendukung kita. Kyai-kyai deklarsi mendukung kita. Klompok-klompok muda yang notabennya adalah anak-anak tokoh NU, Ipnu, Ipp, Fatayat, Anshor, Muslimat. Alhamdulillah.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya hampir semua tokoh agama itu mendukung kandidat Saiful Illah mulai dari tokoh-tokoh pesantren mulai dari Kyai dan Bu Nyai kampung sampai yang lokal, Muballigh, serta kelompok-kelompok muda diantaranya anak-anak tokoh NU, Ipnu, Ipp, Fatayat, Anshor, Muslimat.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih selaku sekretaris Tahfidz DPC Partai PKB serta Tim sukses dari Abah Ipul dalam Pilkada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 yang ditemui dikantor DPRD tanggal 20 Juli 2016 pukul 14.00 WIB

Jadi dalam memenangkan pilkada pada kali ini, peran tokoh agama juga sangat mendukung dan berpengaruh dalam kemenangan calon Petahana yakni Saiful Illah. Apalagi beliau juga orang PKB yang berbasis NU.

Namun dengan demikian, terdapat berbagai yang dihadapi calon petahana dalam memenangkan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015. Dalam sebuah kompetisi pasti ada kendala dan hambatan untuk memenangkannya, terlebih untuk memenangkan pilkada abah ipul mempunyai kesulitan atau kendala, sesuai dengan penuturan bapak nasih sebagai berikut:

“Yang namanya manusia pasti ada kesulitan, ada kejanggalan, ada hambatan, ya pasti, mungkin kalo dikatakan kesulitan hambatan itu adalah ya hal biasalah karena banyak calon misalkan, kemudian masing-masing calon punya kepentingan yang berbeda-beda sehingga kadang-kadang hambatannya ataupun kendalanya itu ditingkatkan klompok ditingkatkan calon sehingga kita sering anggep ae rame ataupun gejeran ditingkatkan kebijakan KPU ya... yang kedua terakait dengan masalah publikasi atau alat praga kampanye dari KPU, kita sebagai incumbent sangat dirugikan dan sempat protes juga karena dibatasi ya kan... kalo yang pertama kan bebas tidak ada pembatasan terkait alat peraga kampanye dari mulai poster, baliho, pamflet semuanya itu tidak ada batasan dulu. Selang dibanasi dan yang bikin adalah KPU itu sangat merugikan kita k karena cara pemasangannya, letaknya itu sangat-sangat tidak bagus dan penuh kontroveksi yang ketiga mungkin adalah kendalanya karena kita ngerumat dan ngeramut banyak orang, banyak tokoh ya ada sajalah salah satu dua tiga tokoh yang berseberangan dengan PKB ataupun kita wajar itu, dan insyaallah tidak ada masalah. Kendalanya itu saja.”

Selain itu adanya konflik juga dapat menghambat sang calon untuk memenangkan pemilu di Sidoarjo tahun 2015. Tetapi hal tersebut bukan merupakan faktor utama yang menjadi kendala utama, sesuai dengan penuturan bapak Nasih

Bukan konflik ya.. namanya perhelatan politik pasti ada puas tidak puas, lego tidak lego, ya gitu kan ya... ataupun pas atau tidak pas itu pastilah. Kita memnag ada ketika penjaringan kemaren itu karena tidak merasa puas kemudian dia ikut tim paslon yang lain. Nah ada beberapa pengurus kita, kalo itu terjadi ya sudah memang seperti itu, paling tidak kita ngasih SP dan melaporkan kepada atasan kita DPW dan

DPP mereka yang mempunyai wewenang. Tapi itu bukan konflik itu hanya mufaroqoh memisahkan diri dari pengurus yang memang ternyata kurang pas kurang legowo terkait proses penjangkaran dan ngusungnya pasangan kita. Dia beralih ke pasangan yang lain.

Namun disini konflik tidak menjadi kendala utama untuk memenangkan calon petahana dalam pilkada tahun 2015. Namun hanya saja dalam publikasi yaitu alat peraga kampanye itu di batasi oleh KPU. Karena mereka adalah calon Incumbent.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul *Komunikasi Politik Calon Petahana (Studi Kasus Saiful Illah Dalam Kemenangan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo 2015)* dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi politik yang digunakan untuk memenangkan Calon petahana sudah cukup efektif diantaranya dalam berkomunikasi dengan pemilih, tim pemenangan beserta Saiful Illah dan Nur Ahmad Syaifudin menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sehingga pemilih paham dengan apa yang disampaikan misalnya mengenai pentingnya memilih pemimpin.

Serta dalam membaur Saiful Illah bisa menyesuaikan diri terhadap berbagai kalangan.

Jika melihat hasil temuan yang peneliti temukan dalam pilkada 2015, strategi politik yang digunakan oleh tim pemenangan Calon Petahana menjelang pilkada diantaranya, a) Gerakan struktural, gerakan langsung yang meliputi partai kebangkitan bangsa (PKB) dan Banom-banomnya, NU beserta Banom-Banomnya, seperti Muslimat, Ansor, IPNU, dan IPPNU, b) Gerakan non struktural, yang meliputi partai-partai pendukung, ORMAS, UKP, LSM, pengusaha dan orang-orang birokrasi.

Selain strategi komunikasi politik diatas, tim sukses pasangan calon kandidat juga menggunakan strategi pendekatan. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama baik kyai-kyai kampung atau lokal. Langkah-langkah yang dimiliki oleh tim sukses itu memiliki 5 pilar, salah satunya adalah jaringan penguat. Jaringan penguat ini berasal dari jaringan keluarga, yaitu keluarga calon bupati, wakil bupati, serta dari keluarga besar dari partai kebangkitan bangsa (PKB). Di dalam dunia politik komunikasi politik yang efektif juga berpengaruh dalam kemenangan Saiful Illah atau yang kerap dikenal dengan Abah Ipul di pilkada 2015 Kabupaten Sidoarjo. Namun di balik kemenangannya di pilkada 2015 ini, pasti ada konflik karena setiap manusia itu pasti mempunyai kesulitan, kejanggalan dan hambatan.

Namun semua itu tergantung bagaimana seseorang menangani masalah hal tersebut. Kesulitan atau hambatan merupakan hal yang biasa karena dalam pilkada itu ada banyak calon. Setiap masing-masing calon mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sehingga terkadang hambatan ataupun kendala ditingkatkan KPU itu ditingkatkan. Misalnya, kebijakan yang telah dibuat oleh KPU yaitu terkait alat peraga kampanye, mulai dari poster, baliho, pamflet, dan semua itu di batasi hanya untuk calon *incumbent*. Oleh karena itu dari pihak paslon BERSINAR merasa dirugikan dalam hal ini. Disamping itu pula pemasangan dan letaknya itu sangat tidak bagus dan penuh dengan kontroversi. Selain itu dalam konflik

internal anatar anggota fraksi partai itu pasti ada. Namun bagi mereka itu bukan hal yang menjadi permasalahan besar bagi tim pemenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut : 1) Bagi masyarakat, sebagai masyarakat yang memiliki wewenang penuh dalam memilih dan menentukan calon pemimpin harus selalu berusaha untuk menjadikan masyarakat yang cerdas, bijaksana dalam memilih seorang pemimpin, bukan berdasarkan pada segi wajah, pemberian uang, tetapi juga dari segi kinerja serta yang paling penting yaitu dari segi komunikasi 2) Bagi tim pemenangan, terus menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas politik dalam menarik simpati masyarakat, untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon kandidat 3) Bagi pasangan Saiful Illah dan Nur Ahmad Sayifudin, agar melaksanakan amanat yang telah diberikan masyarakat secara baik dan maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikanto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.XII, 2000.
- Ahmadi,Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitif*. Yogyakarta:Ar-Ruz Media, 2014
- Ali, novel. *Peradaban komunikasi politik*, Bandung: remaja rosdakarya 1999
- Ardial, Drs, M.Si. *Komunikasi Politik*, Jakarta Barat: PT Indeks 2010.
- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009
- Bunging, Burhan. *Penelitian Kualitatif edisi kedua*. Jakarta: Kencana, 2011
- Dahlan, Alwi. *Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian dalam Jurnal Ilmu Politik No. 6.*, Kerjasama AIPI, LIPI, Gramedia, Jakarta: 1990
- Henri, ida. *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Jakarta: kencana, 2012
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhtadi, Asep Saeful, M.A. *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Rosda Karya, 2010
- Mubarok, M. Mufti. *Sukses Pilkada*. Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2005
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*. Bandung: remaja karya (cv 1989)

Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: 2010.

Ulber Silalahi, MA. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika, 2010.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis

Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

IndoElection, *Banyaknya Calon Di Pilkada Sidoarjo Untungkan Petahana*, <http://indoelection.com/banyaknya-calon-di-pilkada-sidoarjo-untungkan-petahana/> (akses 28 April 2016)

Kota (sidoarjonews) Pilkada Sidoarjo The Republic Institute Inilah Popularitas Dan Elektabilitas Masing-Masing Calon, <http://dprd-sidoarjokab.go.id/survei-pilkada-sidoarjo-the-republic-institute-inilah-popularitas-dan-elektabilitas-masing-masing-calon.html> (akses 28 April 2016)

M.Rosit. *Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenang Pasangan Kandidat Ratu Atut dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)*. <https://www.google.co.id/lib.ui.ac.id%Ddigital%2F20301204-T30610-Muhamad%2520Rosit>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Silahun, “Memilih Pemimpin Daerah Secara Langsung”, <http://politik.kompasiana.com/2010/06/02/memilih-pemimpin-daerah-secara-langsung/>, diakses 5 Mei 2016

Janpatar Simamora, “Pasang Surut Model Demokrasi Lokal” http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/12/29/12826/pasang_surut_model_demokrasi_lokal/. diakses 5 Mei 2016

<http://kpud-sidoarjokab.go.id/index.php/kpu-sidoarjo> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2016, pukul 20:45)